



RISALAH LENGKAP
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Tentang
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

RAPAT KE : V
MASA PERSIDANGAN : I
TAHUN SIDANG : 2021
HARI KE : 1, 2, 3, dan 4
HARI/TANGGAL : Selasa, 06 April 2021
: Rabu, 07 April 2021
: Selasa, 27 April 2021
: Rabu, 28 April 2021

DIKELUARKAN OLEH :
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2021**

Arsip DPRD Kota Surakarta

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surakarta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan.

LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan cerminan kinerja Pemerintah Daerah, khususnya kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mengimplementasikan visi dan misi dalam RPJMD.

Tantangan terbesar di tahun 2020 dalam menghadapi pandemi Covid-19 telah menuntut adanya adaptasi di seluruh aspek, demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Kota Surakarta. Perubahan yang bergerak dinamis serta penyesuaian kebijakan pembangunan daerah tersebut tentunya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Surakarta.

LKPJ Walikota Surakarta diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah khususnya oleh DPRD Kota Surakarta. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diperlukan bagi perbaikan kinerja tahun berikutnya guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan beserta anggota DPRD atas segala kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kota Surakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa merestui segala upaya kita bersama dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

Maret 2021
WALIKOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Arsip DPRD Kota Surakarta

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR & GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Dasar Hukum	I-1
1.2 Visi dan Misi Walikota Surakarta	I-3
1.3 Data Umum Daerah	I-17
1.3.1 Data Geografis Wilayah	I-17
1.3.2 Jumlah Penduduk	I-20
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	I-22
1.3.4 Jumlah PNS	I-29
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I-36
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I-51
1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	I-51
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD	II-1
I. Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah	II-2
II. Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah	II-6
III. Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah	II-27
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN FEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	III-1
3.1 Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	III-1
3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah	III-1
3.1.3 Hasil Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	III-17
1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	III-18
a. Bidang Pendidikan	III-18
b. Bidang Kesehatan	III-24
c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III-29
d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	III-34
e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	III-37
f. Bidang Sosial	III-41

Arsip DPRD Kota Surakarta

2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan	
Dasar	III-46
a. Bidang Tenaga Kerja	III-46
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak	III-48
c. Bidang Pangan	III-51
d. Bidang Pertanahan	III-52
e. Bidang Lingkungan Hidup	III-53
f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III-57
g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-59
h. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III-60
i. Bidang Perhubungan	III-63
j. Bidang Komunikasi dan Informatika	III-67
k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	III-69
l. Bidang Penanaman Modal	III-72
m. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	III-74
n. Bidang Statistik	III-77
o. Bidang Persandian	III-78
p. Bidang Kebudayaan	III-78
q. Bidang Perpustakaan	III-81
r. Bidang Kearsipan	III-82
3. Urusan Pilihan	III-84
a. Bidang Kelautan dan Perikanan	III-84
b. Bidang Pariwisata	III-85
c. Bidang Pertanian	III-88
d. Bidang Perdagangan	III-91
e. Bidang Perindustrian	III-95
f. Bidang Transmigrasi	III-96
4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	III-96
a. Bidang Administrasi Pemerintahan	III-96
b. Bidang Pengawasan	III-101
c. Bidang Perencanaan	III-104
d. Bidang Keuangan	III-108
e. Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	III-112
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan	III-115
3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-116
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya	III-130
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	IV-1
A. Dasar Hukum	IV-1
B. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	IV-6

Arsip DPRD Kota Surakarta

Arsip DPRD Kota Surakarta

Arsip DPRD Kota Surakarta

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator dalam Mencapai Visi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021	I-5
Tabel 1.2 Luas Wilayah, Jumlah RT dan Jumlah RW Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surakarta	I-18
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2020	I-20
Tabel 1.4 Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2020	I-21
Tabel 1.5 Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kota Surakarta Tahun 2020	I-21
Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2020	I-22
Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2019-2020	I-24
Tabel 1.8 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020	I-25
Tabel 1.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 dan 2020	I-27
Tabel 1.10 Capaian Indikator Komposit IPM Kota Surakarta Tahun 2019-2020	I-27
Tabel 1.11 Perkembangan Komponen Angka Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2019-2020	I-28
Tabel 1.12 Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah Pegawai di Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2020	I-29
Tabel 1.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020	I-36
Tabel 1.14 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2020	I-37
Tabel 1.15 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Per Jenis Retribusi Kota Surakarta Tahun 2020	I-37
Tabel 1.16 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Surakarta Tahun 2020	I-40
Tabel 1.17 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Surakarta Tahun 2020	I-42

Arsip DPRD Kota Surakarta

Tabel 1.18 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Kota Surakarta Tahun 2020	I-43
Tabel 1.19 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Kota Surakarta Tahun 2020	I-43
Tabel 1.20 Rincian Dana Alokasi Umum Kota Surakarta Tahun 2020	I-44
Tabel 1.21 Rincian Dana Alokasi Khusus per Rincian Obyek	I-45
Tabel 1.22 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik per Rincian Obyek	I-46
Tabel 1.23 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	I-47
Tabel 1.24 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	I-48
Tabel 1.25 Bantuan Keuangan Tahun 2020	I-49
Tabel 1.26 Pendapatan Hibah Tahun 2020	I-49
Tabel 1.27 Pendapatan Lainnya Tahun 2020	I-50
Tabel 1.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020	I-51
Tabel 1.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020	I-53
Tabel 1.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020	I-54
Tabel 1.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020	I-55
Tabel 1.32 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020	I-57

Arsip DPRD Kota Surakarta

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

	Halaman
A. GAMBAR	
Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Kota Surakarta dengan Daerah Lain	I-17
B. GRAFIK	
Grafik 1-1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020	I-23

Arsip DPRD Kota Surakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

LKPJ Walikota Surakarta Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 56) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 92);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 56);

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 102);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 107);

14. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 34).;
15. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 19).

1.2 VISI DAN MISI WALIKOTA SURAKARTA

Visi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2016-2021 yang ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah **"Terwujudnya Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera"**.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta, ditetapkan misi Kepala Daerah Terpilih tahun 2016-2021 yakni **"Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan"**. Adapun Penjabaran misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dilakukan dengan menyelaraskan misi kepala daerah terpilih dengan misi RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025. Penjabaran misi pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut:

1. Waras

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat.

2. Wasis

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah.

3. Wareg

Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.

4. Mapan

Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata

kelela pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan

melayani;

5. Papan

Mewujudkan Sarakata ryanian melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreas, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari

pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan pembangunan daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari 5 (lima) misi Wasas, Wasas, Wares, Wapan, Papan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Keterkaitan misi, tujuan, sasaran, serta indikator tujuan dan sasaran strategis daerah ditampilkkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator dalam Mencapai Visi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	KONDISI TAHUN TERAKHIR RPJMD (2021)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	KONDISI TAHUN TERAKHIR RPJMD (2021)
Misi Waras : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, promotif dan preventif kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani	Angka Harapan Hidup (tahun)*	77,13	77,19	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat jasmani dan rohani	1) Persentase rumah tangga berperilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS) (%)	75	80
						2) Prevalensi HIV- AIDS pada populasidewasa	0,010	0,010
						3) Persentase penanganan kasus gangguan jiwa berat(%)	100	100
						4) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	1,83	1,80
					Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	1) Angka kematian ibu	41,83	41,83
						2) Angka Kematian Bayi	2,30	2,20
						3) Angka Kematian Balita	3,14	3,03
						4) Angkakesakitan	44,91	39,98

MISI	INDIKATOR PULUHAN	2019 2020	2021 2022	SASARAN	INDIKATOR DASARAN	TARGET 2021 2022	NONDISK
Misi 1: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*	41,54	41,71	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan perilaku pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat	1) APK : PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B 2) APK : SMP/NU/Paket A, SMP/MTs/Paket B	120 20,00	118 20,00
					3) APK : PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B 4) APK : SMP/NU/Paket A, SMP/MTs/Paket B	100 100	100 100
Misi 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*	41,54	41,71	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan perilaku pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat	5) Angka kesakitan TB 6) Proporsi Kasus Penyakit Tidak Menular 7) Tingkat Deteksi Dini Kesehatan Masyarakat (%) 8) Rasio rumah sakit	0,31	0,33
					9) APK : PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B 10) APK : SMP/NU/Paket A, SMP/MTs/Paket B	72,22	77,77
Misi 3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*	41,54	41,71	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan perilaku pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat	11) APK : PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B 12) APK : SMP/NU/Paket A, SMP/MTs/Paket B	75,46 105 105	80 105 105
Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*	41,54	41,71	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan perilaku pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat	13) APK : PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B 14) APK : SMP/NU/Paket A, SMP/MTs/Paket B	99,56 97,70	100 100

Indikator	Tipe Sasaran	Tipe Sasaran	Kondisi Tahun Berakhir RPJMD 2020	Kondisi Tahun Berakhir RPJMD 2025	Indikator Sasaran	Kondisi	
						Target 2020	Target 2025
berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah	Tipe Sasaran	Tipe Sasaran	Kondisi Tahun Berakhir RPJMD 2020	Kondisi Tahun Berakhir RPJMD 2025	Indikator Sasaran	3) Angka Ketuluan (AL) SD/MI, SMP/MTs	100
						4) Jumlah prestasi pendidikan (siswa, guru, sekolah) tingkat regional/nasional/ internasional (buah)	100
berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah	Tipe Sasaran	Tipe Sasaran	Kondisi Tahun Berakhir RPJMD 2020	Kondisi Tahun Berakhir RPJMD 2025	Indikator Sasaran	5) Jumlah pengunjung perpustakaan/ Taman Cerdas (orang)	860.024
						1) Cakupan layanan pendidikan non formal (%)	3,52
berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah	Tipe Sasaran	Tipe Sasaran	Kondisi Tahun Berakhir RPJMD 2020	Kondisi Tahun Berakhir RPJMD 2025	Indikator Sasaran	2) Cakupan serapan tenaga kerja terampil (%)	79,90
						1) Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk	7,05
berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah	Tipe Sasaran	Tipe Sasaran	Kondisi Tahun Berakhir RPJMD 2020	Kondisi Tahun Berakhir RPJMD 2025	Indikator Sasaran	2) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	15

[illegible]

TUJUAN	INDIKATOR KUALITATAS	SARAN PENCAPAIAN	KOMPONEN PELAKSANAAN	SASARAN KUALITAS	Tertundungnya Konsumen (%)	KONDISI KAWILKUR REJANG (2021)
5.	Pendapatan per kapita(rupiah)	65.771.495,3	69.433.412,42	Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan	1) Persentase jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat kelurahan(%) 2) Persentase transmigran yang diherangkan(%) 3) Persentase klaster Industri yang berkembang (%)	89,15
6.	Pengeluaran per kapita (rupiah)	66.773.682,4	70.757.805,04	16.697,2 50	15	16
		16.242.000	16.697,2 50		24,44	25
					92,86	100
					53,74	53,75
				Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1)Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 2) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100
				Meningkatnya kesempatan kerja	1) Pencari kerja yang ditempatkan(%)	85,82

Kondisi Tahun 2019	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota yang maju, kuat dan mandiri	Indikator Pertumbuhan ekonomi/ PDRB (%) ^a 2. Tingkat inflasi (%) ^a	Target 2021 5,77 - 6,17 2,49 ± 1	Kondisi Tahun 2020 5,84 - 6,24 2,99 ± 1	Sasaran	Indikator Sasaran 2) Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM yang dibina (%) 3) Persentase wirausaha baru (%)	Target 2021 2,01 7	Kondisi Tahun TerakHIR 12,03 42
					Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	7	7,00
					Meningkatnya jumlah investasi	Persentase Rata-rata Pertumbuhan Investasi (%)	6,65	6,28
					Berkembangnya ekonomi kreatif dan kota tujuan wisatawan dan budayanya	1) Jumlah kunjungan wisatawan (orang) 2) Persentase Pendapatan investasi (%)	5.500.000 38,57	5.750.000 45,71

MISI	INDUKTOR TUJUAN	TARGET	KONDISI JALAN TERAKHIR R/MD (2021)	INDUKTOR STRATEGIS	TARGET 2020	INDUKTOR R/MD (2021)
Misi Mapan: Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkeadilan dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat	78	52 (amat baik)	Meningkatkannya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi/informasi (Solo SmartCity)	85,37	100
	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis e-Government			1) Persentase yang melaksanakan integrasi aplikasi e-governance (%) 2) Persentase yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (%) 3) Persentase Ketersediaan SOP persandian (%) 4) Persentase informasi keluaran aktivitas DPRD yang dipublikasikan berbasis teknologi informasi sesuai SOP yang berlaku (%)	100 0 93,02	100 100 95,00

INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR TERLAKUKAN	PERKONDISI TAHUN TERAKHIR (Rp (Miliar))	PERKONDISI TAHUN TERAKHIR	INDIKATOR SASARAN	Nilai 2019 (Rp (Miliar))	Nilai 2020 (Rp (Miliar))
				Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Keuangan Birokrasi	1) Mutu pelayanan (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemerintah Kota Surakarta 2) (Hsina BPK terhadap laporan keuangan daerah) 3) Persentase penyelesaian kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2008 (%) 4) Persentase pemenuhan pelanggaran disiplin aparatur (%) 5) Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (%) 6) Persentase aset yang bersertifikat (%)	3,10 73,20 4,033 91,93 92,69	3,2 (level terkecil dan terukur) WTP 91,2 0,022 95,73 94,84

MISI	INDUKTOR PENGEMBANGAN	INDUKTOR PENGEMBANGAN	TARGET PENGEMBANGAN	KONDISI PENGEMBANGAN	KONDISI PENGEMBANGAN	INDUKTOR PENGEMBANGAN	TARGET PENGEMBANGAN	KONDISI PENGEMBANGAN	INDUKTOR PENGEMBANGAN	TARGET PENGEMBANGAN	KONDISI PENGEMBANGAN
	Meningkatnya kinerja pembangunan daerah berkeadilan dan keberlanjutan lingkungan	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan (%) : KIPMD RKPD	80 75	80 80	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	1) Persentase ketersediaan data perencanaan sesuai Standar Ketuntasan Layanan Data(%) 2) Hasil AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) bernilai Baik : Nilai LPP dan EKPMD Hasil Evaluasi LKIP	80 3,35 (ST) 90 (AA)	100 3,4 (ST) 93 (AA)			
	Meningkatnya ketertarikan, keamanan, penegakan hukum dan hak asasi manusia serta	Persentase penyelesaian pelanggaran K3/ketertarikan, ketertarikan, keendahan(%) *	96	96,67	Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan Menurunnya konflik antar kelompok masyarakat	1) Cakupan Peserta K3 Aktif(%) 2) Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	69,30 0,6	69,8 0,6			
						Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan/keberhasilan (%)	100	100			
					Menurunnya pelanggaran produk	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	87,62	88,57			

MISI	TUJUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET 2020 R/MD 2020	KONDISI TAHUN TERAKHIR R/MD 2021	INDIKATOR SASARAN PENCAPAIAN	TARGET 2020 R/MD 2020	KONDISI TAHUN TERAKHIR R/MD 2021
Misi Tapan : Mewujudkan Sukakarta nyaman melalui pemerintahan kebutuhan perumahan dan perumukinan, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkualitas, serta berwawasan keperluan dan lingkungan, dan budaya	harmoni sosial masyarakat	1. Persentase luas Kawasan Kumuh(%) 2. Infrastruktur Kota dalam kondisi baik (%)	0 85,61	0 87,61	Jumlah durenah Meningkatnya kemudahan perumahan yang layak huni dan berkurangnya perumukinan kumuh	(%) 1) Persentase Penurunan KTIH (%) 2) Persentase Lingkungan yang sehat dan aman yang dukungan dengan [51,3(%) 3) Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (%) 4) Persentase Rumah yang bersantasi (%)	75,79 100 100 100 100
					Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	1) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%) 2) Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik(%) 3) Persentase Panjang jalan yang memiliki drainase/ saluran	87,05 90 79,77
							90,05 91 81,77

KONDISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2020	KONDISI TAHUN TERAKHIR RPJMD (2021)	BASAHEN	INDIKATOR SAMA RATA TAHUN TERAKHIR RPJMD (2021)	KONDISI TAHUN TERAKHIR RPJMD (2021)
						pembuangan air dalam kondisi baik (%)	
						4) Persentase uperasi koridor BST yang terlayani	0 100
					Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	97,25 97,32
					Meningkatnya kesapsilagaan system antisipasi risiko kebakaran	Persentase kelurahan tanggul bencana (%)	17,65 23,53
					Meningkatnya kualitas dan kualitas Ruang Publik	1) Persentase penambahan luas ruang publik yang dinautatkan(%) 2) Rasio tuang Terbuka Hijau Publik	28,61 100 9,94 10

MISI	INDUKSIAN	INDIKATOR	TARGET MILESTONE	KONDISI	INDUKSIAN	INDIKATOR	TARGET MILESTONE	KONDISI
Meningkatkan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Persentase Sarana dan Prasarana (%)	83,47	85,77	Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdayasaing	1) Persentase Pasar Rakyat yang memenuhi persyaratan (%)	75	77,27	
	1. kegiatan representatif				2) Persentase tersedianya Prasarana Umum di Kluster Ekonomi Kreatif (%)	24	28	
	2. kegiatan ekumaniyitas representatif	49,50	52,64	Tersedianya sarana prasarana sosial budaya	Persentase prasarana sosial budaya yang representatif (%)	56,40	59,30	
					1) Cakupan Bendah, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	
					2) Persentase Sarana penyediaan seni dan budaya	85	92	
					3) Persentase tempat ibadah yang diibadahi			

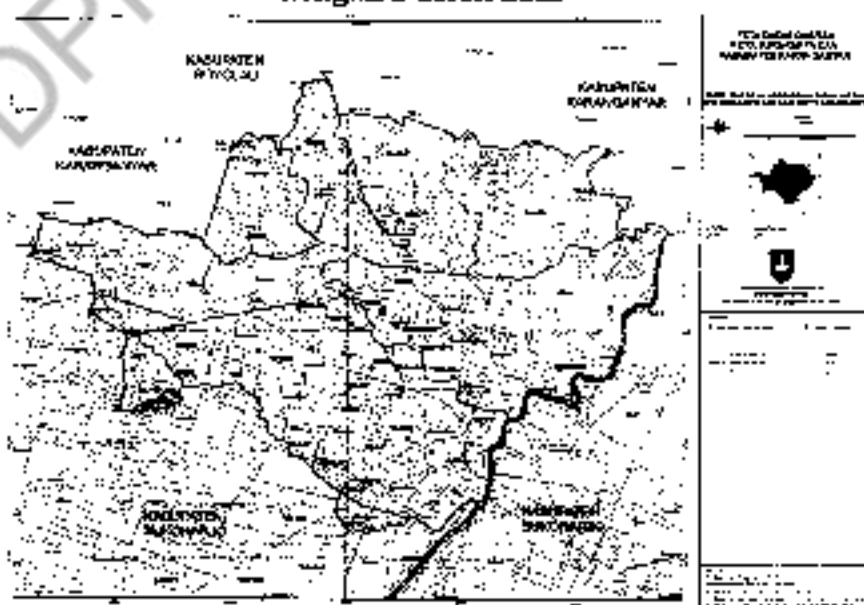
1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Secara geografis, Kota Surakarta merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah, terletak antara $110^{\circ}45'15''$ - $110^{\circ}45'35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}36'$ - $7^{\circ}56'$ Lintang Selatan. Dilihat dari kondisi topografinya, wilayah Kota Surakarta merupakan wilayah dataran rendah yaitu dengan ketinggian wilayah antara 105 meter diatas permukaan laut sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut (pusat kota). Selain itu, Kota Surakarta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Gunung Merapi di bagian barat, Gunung Lawu di sebelah timur, Pegunungan Sewu di sebelah selatan dan terdapat sungai besar yang melintasi yaitu Sungai Bengawan Solo.

Kota Surakarta berbatasan dengan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali di sebelah utara diatur melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2013, Kabupaten Karanganyar di sebelah selatan diatur melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2013, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan dan barat diatur melalui Permendagri Nomor 49 Tahun 2016.

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Kota Surakarta dengan Daerah Lain



Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Surakarta, 2020

Letak Kota Surakarta yang strategis menjadikan Kota Surakarta

berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa. Kota Surakarta
diopang 6 (enam) daerah kabupaten di sekitarnya, diantaranya:

Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar dan Wonogiri.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK
tanggal 27 Agustus 2020 hal Penetapan Luas Wilayah
Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah
luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km² dari luas semula 44,04
Km²; hal ini dipengaruhi penutakhiran segmen batas wilayah
administrasi.

Kota Surakarta secara administratif terbagi menjadi 5 wilayah
administrasi kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Pemerintah Kota
Surakarta menambah jumlah kelurahan hasil pemekaran dari semula
51 kelurahan menjadi 54 kelurahan, yang terdiri dari 626 Rukun
Warga (RW) dan 2.784 Rukun Tetangga (RT). Penetapan tersebut
dukul dengan proses penyusunan administrasi dokumen
kependudukan pada warga di wilayah kelurahan pemekaran dengan
rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2

Luas Wilayah, Jumlah RT dan Jumlah RW
Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surakarta

NO	KECAMATAN DAN KELURAHAN	LUAS WILAYAH (km ²)	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1	Kecamatan Laweyan	8,638	105	458
1	Kel. Pajang	1,553	16	88
2	Kel. Laweyan	0,248	3	10
3	Kel. Bumi	0,373	7	28
4	Kel. Parulutan	0,544	8	48
5	Kel. Penunping	0,503	6	28
6	Kel. Srawedart	0,513	6	25

7	Kel. Purwasari	0,843	14	51
8	Kel. Sondakan	0,785	15	51
9	Kel. Kerten	0,921	13	48
10	Kel. Jajar	1,055	8	45
11	Kel. Karangasem	1,300	9	36
II	Kecamatan Serengan	3,194	72	312
1	Kel. Joyotakan	0,459	6	32
2	Kel. Danukusuman	0,508	15	58
3	Kel. Serengan	0,640	15	61
4	Kel. Tipes	0,640	15	69
5	Kel. Kratonan	0,324	6	35
6	Kel. Jayengan	0,293	9	30
7	Kel. Kemlayan	0,330	6	24
III	Kecamatan Pasar Kliwon	4,815	101	436
1	Kel. Joyosuran	0,540	12	55
2	Kel. Semanggi	0,894	16	87
3	Kel. Pasar Kliwon	0,360	12	36
4	Kel. Gapahan	0,339	9	31
5	Kel. Bahuwarti	0,407	12	38
6	Kel. Kampung Baru	0,306	6	21
7	Kel. Kedung Lumbu	0,551	7	30
8	Kel. Sangkrah	0,452	13	58
9	Kel. Kauman	0,192	6	22
10	Kel. Mojo	0,774	8	58
IV	Kecamatan Jebres	12,582	153	649
1	Kel. Kepatihan Kulon	0,175	3	20
2	Kel. Kepatihan Wetan	0,225	2	18
3	Kel. Sudiroprajan	0,230	9	35
4	Kel. Gandekan	0,350	9	36
5	Kel. Sewu	0,485	9	34
6	Kel. Purang Sawit	1,270	15	56
7	Kel. Jagalan	0,650	15	63
8	Kel. Purwodiningratan	0,373	10	35
9	Kel. Tegalarjo	0,325	6	33

No	Kecamatan	n	%	n	%	Perempuan	Jumlah
1	Laweyan	50.372	17,64	52.390	17,90	102.762	17,77
2	Surenghin	26.824	9,39	27.677	9,45	54.501	9,42
3	Pasar Kliwon	43.287	15,16	43.995	15,03	87.282	15,09
4	Jebres	73.768	25,83	75.008	25,62	148.776	25,72

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kota Surakarta Tahun 2020

Tabel 1.3

Kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 (semester 2) sebanyak 578.350 jiwa, dengan sebaran menurut jenis kelamin dan

1.3.2 JUMLAH PENDUDUK

Sumber: Bagian Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2020

10	Kel. Jebres	3.170	36	128
11	Kel. Mojosoango	5.329	39	191
V	Kecamatan Banjarsari	14.811	196	929
1	Kel. Katupiro	1.819	19	107
2	Kel. Nusukan	2.124	24	143
3	Kel. Gilingan	1.272	21	112
4	Kel. Setabean	0.277	9	31
5	Kel. Kestalan	0.208	6	20
6	Kel. Kepribon	0.318	6	26
7	Kel. Timuran	0.315	5	22
8	Kel. Kelelan	0.250	9	31
9	Kel. Pungkrayan	0.360	6	31
10	Kel. Mangkubumen	0.797	14	58
11	Kel. Manahan	1.280	13	61
12	Kel. Sumber	1.333	17	76
13	Kel. Banyuwangi	1.250	12	48
14	Kel. Banjarsari	2.339	22	103
15	Kel. Joglo	0.869	12	60

5	Banjarsari	91.340	31,98	93.689	32,00	185.029	31,99
JUMLAH		285.591	100	292.759	100	578.350	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2020 Semester 2, diolah.

Secara rinci jumlah penduduk Kota Surakarta berdasarkan kelompok usia disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0-4	19.659	6.88%	18.457	6.30%	38.116	6.59%
2	5-9	22.186	7.77%	21.645	7.39%	43.831	7.58%
3	10-14	23.314	8.16%	21.948	7.50%	45.262	7.83%
4	15-19	22.577	7.91%	22.002	7.52%	44.579	7.71%
5	20-24	21.882	7.66%	21.524	7.35%	43.406	7.51%
6	25-29	21.682	7.59%	21.388	7.31%	43.070	7.45%
7	30-34	20.253	7.09%	19.889	6.79%	40.142	6.94%
8	35-39	23.364	8.18%	23.287	7.95%	46.651	8.07%
9	40-44	22.888	8.01%	22.942	7.84%	45.830	7.92%
10	45-49	20.062	7.02%	20.903	7.14%	40.965	7.08%
11	50-54	18.516	6.48%	20.089	6.86%	38.605	6.68%
12	55-59	15.713	5.50%	18.103	6.18%	33.816	5.85%
13	60-64	13.216	4.63%	15.142	5.17%	28.358	4.90%
14	65-69	9.340	3.34%	10.480	3.58%	20.020	3.46%
15	70-74	5.083	1.78%	6.168	2.11%	11.251	1.95%
16	>=75	5.656	1.98%	8.792	3.00%	14.448	2.50%
Jumlah		285.591	100,00%	292.759	100,00%	578.350	100,00%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2020 Semester 2, diolah.

Sementara rasio kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 13.132 jiwa/km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Pasar Kliwon, sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Jebres, yang digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kota Surakarta Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk
		n	%		
1	Laweyan	102.762	17,77	8,64	11.894

Pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal dan juga dipengaruhi oleh faktor migrasi dimana jumlah penduduk datang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang pindah keluar kota Surakarta.

Aspek kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu daya tarik yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu wilayah. Setiap

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2020 Semester 2, tahun.

Kecamatan	Jumlah Penduduk Sekarang		Jumlah Penduduk Periode Sebelumnya	Angka Pertumbuhan
		%		%
2 Serengan	54.501	9,42%	54.671	9,50%
3 Pasar Kliwon	87.282	15,09%	86.890	15,11%
4 Jebres	148.776	25,72%	147.694	25,68%
5 Banjarsari	185.029	31,99%	184.451	31,89%
Jumlah	578.350	100%	575.290	100%
				0,54%

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2020

Penduduk Kota Surakarta mengalami pertumbuhan sebesar 0,54% pada periode tahun 2020 dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya dengan pertumbuhan tertinggi pada Kecamatan Banjarsari sebesar 0,86% dan terdapat pertumbuhan minus pada Kecamatan Serengan sebesar -0,31%, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

1.3.3 PERTUMBUHAN PENDUDUK

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2020 Semester 2, tahun.

	Jumlah			
2 Serengan	54.501	9,42	3,19	17.085
3 Pasar Kliwon	87.282	15,09	4,82	18.108
4 Jebres	148.776	25,72	12,58	11.826
5 Banjarsari	185.029	31,99	14,81	12.494
Jumlah	578.350	100	44,05	13.132

daerah tentu berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun demikian kondisi pandemik covid-19 berdampak cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara global, demikian pula pada Kota Surakarta. Indikator ekonomi makro kota secara umum dapat dilihat dari tingkat laju inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dengan penjelasan sebagai berikut:

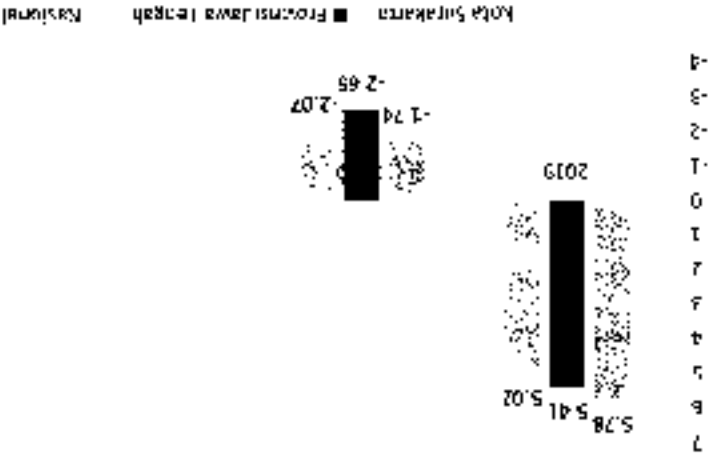
- a. Laju Inflasi di Kota Surakarta tahun 2020 sebesar 1,38% menurun dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 2,94% dan lebih rendah dibandingkan inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,57% dan inflasi nasional sebesar 1,68%. Menurunnya angka inflasi disebabkan karena pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi perekonomian secara umum dimana pendapatan per kapita menurun sehingga mendorong pula turunnya daya beli masyarakat yang berakibat pada melimpahnya barang serta turunnya harga barang secara umum.
- b. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta di tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar -1,74%. Namun demikian relatif lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional Jawa Tengah yang ditunjukkan dalam grafik berikut:

Grafik 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2020

Kategori	Urutan	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,97	1,92
	1 Perikanan, Kehutanan, Perburuan dan Jasa Perikanan	2,98	1,92
	2 Kehutanan dan Perkebunan Kayu		
	3 Perikanan	1,97	0,63
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,68	-6,15
C	Industri Pengolahan	5,88	-4,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,21	1,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Baku Ulang	4,74	3,22
F	Konstruksi	4,61	-1,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,18	-5,18
H	Transportasi dan Pergudangan	7,32	-62,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,21	-15,67
J	Informasi dan Komunikasi	10,12	19,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,44	2,13
L	Rental Estate	2,98	0,43
M,N	Jasa Perusahaan	9,53	-8,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jasa Sosial Wajib	3,90	-2,15
P	Jasa Pendidikan	5,98	-0,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,19	12,11

Tabel 1.7
 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
 Kota Surakarta Tahun 2019-2020

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020
 Komponen yang mendukung indikator pertumbuhan ekonomi digambarkan dalam tabel berikut:



R,S,T,U	Jasa lainnya	7,44	-14,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		8,78	-1,74

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020

- c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Surakarta tahun 2020 mencapai Rp. 47.644.563,664. Secara umum nilai PDRB ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar Rp. 48.002.275,99. Beberapa lapangan usaha yang mengalami penurunan signifikan dalam pembentukan PDRB atas dasar berlaku Kota Surakarta Tahun 2020 yakni lapangan usaha konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami peningkatan yang juga cukup signifikan antara lain lapangan usaha informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.8

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020

KATEGORI	URAIAN	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	233.444,75	243.528,14
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	232.517,66	242.559,89
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,00	0,00

d. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita juga direfleksikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan mencerminkan kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah.

Kondisi pandemi Covid-19 bernilai efek sampai pada pendapatan per kapita. Pada Tahun 2020 pendapatan perkapita mengalami kontraksi sebesar -0,96%. Pada Tahun 2020 pendapatan per kapita Kota Surakarta sebesar Rp.92.056.650,12 lebih kecil dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp.92.946.968,50. Menggecihnya pendapatan perkapita berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau dengan kata lain daya beli masyarakat menjadi menurun.

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020

KATEGORI	URAIAN	(1)	(2)	(3)	(4)
B	Pertambahan dan Pengalihan	926,89	289,08	291,60	
	Industri Pengolahan	4.060.045,30	94.467,61	95.484,59	
	Pengadaan Listrik dan Gas	68.562,62	74.921,49	13.011.416,38	12.883.929,92
F	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Baur Ulang	13.011.416,38	10.635.516,54	10.635.516,54	10.635.516,54
	Konstruksi	12.883.929,92	10.635.516,54	10.635.516,54	10.635.516,54
C	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparat, Mobil dan Sepeda Motor	10.635.516,54	10.635.516,54	10.635.516,54	10.635.516,54
H	Transportasi dan Pergudangan	1.241.375,56	488.770,97	488.770,97	488.770,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.241.375,56	488.770,97	488.770,97	488.770,97
J	Informasi dan Komunikasi	5.764.427,29	6.929.679,08	6.929.679,08	6.929.679,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.805.302,07	1.856.484,85	1.856.484,85	1.856.484,85
L	Real Estate	1.846.239,69	1.890.733,35	1.890.733,35	1.890.733,35
M,N	Jasa Perusahaan	414.236,87	387.892,84	387.892,84	387.892,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.594.387,03	2.567.427,62	2.567.427,62	2.567.427,62
	Jasa Pendidikan	2.643.711,13	2.688.467,54	2.688.467,54	2.688.467,54
F	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	535.372,96	622.766,87	622.766,87	622.766,87
Q	Jasa lainnya	456.680,62	402.465,17	402.465,17	402.465,17
R,S,T,U					
GROSS DOMESTIC REGIONAL					
Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020					

Kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi prioritas utama pembangunan meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Kemiskinan, digambarkan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk serta digunakan untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup yang layak, meliputi Angka Harapan Hidup, Angka Harapan lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita.

Angka IPM Kota Surakarta Tahun 2020 sebesar 82,21 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 81,84 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 dan 2020

	2019	2020
Kota Surakarta	81,86	82,21
Provinsi Jawa Tengah	71,73	71,87
Nasional	71,92	71,94

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020

Gambaran indikator pembentuk IPM Kota Surakarta dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.10
Capaian Indikator Komposit IPM
Kota Surakarta Tahun 2019-2020

No	INDIKATOR	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	77,12	77,22
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,55	14,87
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,54	10,69
4	Pengeluaran per kapita	Rp. 15.049.000	Rp. 14.761.000

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020

b. Angka Kemiskinan

INDIKATOR	2019	2020	Garis Kemiskinan (Rp/ah)	Jumlah penduduk miskin (dalam 000 jiwa)	Persentase penduduk miskin (%)
			473.516,00	45,18	8,70
			487.415,00	47,03	9,03

Tabel 1.11
Perkembangan Komponen Angka Kemiskinan
Kota Surakarta Tahun 2019-2020

dalam tabel berikut

Perkembangan komponen angka kemiskinan disajikan

kehidupan pengeluaran di antara penduduk miskin

indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan

kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran

kudalawaan dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat

sebanyak 45.180 orang (8,70%).

dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Tahun 2019

2020 mencapai 47.030 orang (9,03%), naik 1.850 orang

Jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta pada Tahun

miskin.

minimal sebesar 60 rumah tangga agar tidak dikategorikan

sedangkannya rumah tangga harus memiliki pendapatan

tangga, baik makanan dan non makanan. Dengan kata lain,

pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah

tangga adalah gabungan besarnya nilai rata-rata

bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan per rumah

yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di

Kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk

penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis

bulan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi

Indeks Kedalaman Kemiskinan (F1)	1,60	1,51
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,48	0,38

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020

1.3.4 JUMLAH PNS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, Perangkat Daerah di Kota Surakarta terdiri dari :

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Inspektorat
- 4) Dinas Daerah = 22 unit
- 5) Badan Daerah = 3 unit
- 6) Kecamatan = 5 unit

Secara lengkap Perangkat Daerah di Kota Surakarta, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan jumlah pegawainya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.12
Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah Pegawai di
Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2020

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat Daerah	132
	1) Bagian Tata Pemerintahan	
	2) Bagian Hukum	
	3) Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	4) Bagian Kerjasama	
	5) Bagian Perekonomian	
	6) Bagian Administrasi Pembangunan	
	7) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
	8) Bagian Organisasi	
	9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	

10)	Bagian Umum		
2)	Sekretariat DPRD	30	
3)	Inspeskorat	43	
4)	Dinas Pendidikan	1.844	
1)	UPT Sanggar Kegiatan Belajar	5	
2)	UPT Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif	3	
3)	SMP Negeri 1 Surakarta	44	
4)	SMP Negeri 2 Surakarta	42	
5)	SMP Negeri 3 Surakarta	40	
6)	SMP Negeri 4 Surakarta	44	
7)	SMP Negeri 5 Surakarta	39	
8)	SMP Negeri 6 Surakarta	39	
9)	SMP Negeri 7 Surakarta	43	
10)	SMP Negeri 8 Surakarta	40	
11)	SMP Negeri 9 Surakarta	42	
12)	SMP Negeri 10 Surakarta	35	
13)	SMP Negeri 11 Surakarta	38	
14)	SMP Negeri 12 Surakarta	46	
15)	SMP Negeri 13 Surakarta	40	
16)	SMP Negeri 14 Surakarta	36	
17)	SMP Negeri 15 Surakarta	43	
18)	SMP Negeri 16 Surakarta	31	
19)	SMP Negeri 17 Surakarta	38	
20)	SMP Negeri 18 Surakarta	38	
21)	SMP Negeri 19 Surakarta	42	
22)	SMP Negeri 20 Surakarta	34	
23)	SMP Negeri 21 Surakarta	33	
24)	SMP Negeri 22 Surakarta	29	
25)	SMP Negeri 23 Surakarta	40	
26)	SMP Negeri 24 Surakarta	38	
27)	SMP Negeri 25 Surakarta	36	
28)	SMP Negeri 26 Surakarta	31	

	29)	SMP Negeri 27 Surakarta	31
5.	Dinas Kesehatan		59
	1)	UPT Puskesmas Banyuanyar	48
	2)	UPT Puskesmas Gajahan	51
	3)	UPT Puskesmas Gambirsari	34
	4)	UPT Puskesmas Gilingan	29
	5)	UPT Puskesmas Jayengan	36
	6)	UPT Puskesmas Kratonan	35
	7)	UPT Puskesmas Manahan	27
	8)	UPT Puskesmas Ngoresan	26
	9)	UPT Puskesmas Nusukan	29
	10)	UPT Puskesmas Pajang	46
	11)	UPT Puskesmas Penumping	27
	12)	UPT Puskesmas Pucangsawit	30
	13)	UPT Puskesmas Purwodiningratan	33
	14)	UPT Puskesmas Purwosari	32
	15)	UPT Puskesmas Sangkrah	38
	16)	UPT Puskesmas Setabelan	37
	17)	UPT Puskesmas Sihela	44
	18)	UPT Instalasi Farmasi	10
	19)	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	11
	20)	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno	38
6.	Rumah Sakit Umum Daerah		147
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		83
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		45
	1)	UPT Rumah Sewa	6
9.	Dinas Sosial		40
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		44
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat		22
	1)	UPT Pelayanan Terpadu Perempuan	3

		dan Anak Surakarta		
12.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			37
	1)	UPT Ruqiah Polong Hewan		7
	2)	UPT Aneka Usaha Perikanan		7
	3)	UPT Pusat Kesehatan Ileana		6
13.	Dinas Lingkungan Hidup			236
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			35
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			22
16.	Dinas Perhubungan			69
	1)	UPT Transportasi		6
17.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			28
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			29
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			42
20.	Dinas Kependaan dan Olah Raga			40
21.	Dinas Kebudayaan			48
	1)	UPT Museum		3
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			29
23.	Dinas Pariwisata			25
	1)	UPT Kawasan Wisata		5
24.	Dinas Perdagangan			205
	1)	UPT Metrologi Legal		15
25.	Dinas Penadarn Kebakaran			46
26.	Satuan Polisi Pamong Praja			47
27.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			68
28.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			36
	1)	UPT Solo Technopark		5
29.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah			50

30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12
31.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	13
32.	Kecamatan Laweyan	17
	1) Kelurahan Pajang	7
	2) Kelurahan Laweyan	8
	3) Kelurahan Bumi	6
	4) Kelurahan Panularan	6
	5) Kelurahan Penumping	7
	6) Kelurahan Sriwedari	6
	7) Kelurahan Purwosari	5
	8) Kelurahan Sondakan	7
	9) Kelurahan Kerten	6
	10) Kelurahan Jajar	6
	11) Kelurahan Karangasem	7
33.	Kecamatan Serengan	20
	1) Kelurahan Joyotakan	8
	2) Kelurahan Damukusuman	7
	3) Kelurahan Serengan	7
	4) Kelurahan Tipes	6
	5) Kelurahan Kratonan	6
	6) Kelurahan Jayengan	7
	7) Kelurahan Kemlayan	7
34.	Kecamatan Pasar Kliwon	18
	1) Kelurahan Joyosuran	7
	2) Kelurahan Semanggi	6
	3) Kelurahan Pasar Kliwon	5
	4) Kelurahan Gajahan	6
	5) Kelurahan Baluwarti	6
	6) Kelurahan Kampung Baru	6
	7) Kelurahan Kedung Lumbu	7
	8) Kelurahan Sangkrah	8
	9) Kelurahan Kauman	7

Sumber: HK/PD Kota Surakarta, 2020

35.	Kecamatan Jebres	10)	Kelurahan Bijo	6	
		1)	Kelurahan Kepathahan Kulon	5	
		2)	Kelurahan Kepathahan Wetan	6	
		3)	Kelurahan Sudiroprajan	6	
		4)	Kelurahan Gandekan	7	
		5)	Kelurahan Sewu	6	
		6)	Kelurahan Pucang Sawit	7	
		7)	Kelurahan Japalan	7	
		8)	Kelurahan Purwodiningrat	6	
		9)	Kelurahan Tegulharjo	7	
		10)	Kelurahan Jebres	7	
		11)	Kelurahan Mojosoongo	8	
36	Kecamatan Banjarsari	1)	Kelurahan Kadipuro	8	
		2)	Kelurahan Nusukan	7	
		3)	Kelurahan Giliman	7	
		4)	Kelurahan Setabelan	7	
		5)	Kelurahan Kestalan	7	
		6)	Kelurahan Keprebon	7	
		7)	Kelurahan Timuran	6	
		8)	Kelurahan Ketelan	8	
		9)	Kelurahan Pungganwan	6	
		10)	Kelurahan Mangkubumen	6	
		11)	Kelurahan Manahan	7	
		12)	Kelurahan Sumber	5	
		13)	Kelurahan Banyuwang	6	
		14)	Kelurahan Banjarsari	6	
		15)	Kelurahan Jogo	6	
			TOTAL	5.827	

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah pegawai di Kota Surakarta sejumlah 5.827 orang yang terdiri dari 2.630 orang pegawai laki-laki dan 3.197 orang pegawai perempuan, jika dibandingkan dengan Tahun 2019 (5.840 orang), jumlah pegawai pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 13 orang. Hal ini disebabkan tingginya jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun dibandingkan dengan jumlah pegawai yang mutasi masuk ke Pemerintah Kota Surakarta. Adanya pegawai aktif yang meninggal dunia juga menyebabkan penurunan jumlah pegawai tersebut.

1.3.5 REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Kinerja pendapatan daerah tahun 2020 sebagai berikut

Tabel 1.13

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2020

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	JUMLAH		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	402.870.481.279,00	492.764.834.440,00	122,37
1.1.1	Pajak Daerah	222.000.000.000,00	279.273.739.740,00	125,80
1.1.2	Retribusi Daerah	33.410.413.141,00	46.513.877.556,00	87,09
1.1.3	Fond Pengkelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.533.051.338,00	12.497.651.735,00	99,72
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	111.927.016.780,00	74.479.543.819,00	134,12
1.2	Pendapatan Transfer	1.308.605.395.918,00	1.269.819.659.587,00	97,04
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.058.860.765.105,00	1.065.123.446.177,00	96,73
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	41.860.671.309,00	61.860.673.003,00	100
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	195.330.452.813,00	132.273.766.816,00	68,09
1.2.4	Bantuan Keuangan	32.553.000.000,00	30.261.273.379,00	94,31
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	77.981.975.308,00	68.723.405.180,00	88,13
1.3.1	Pendapatan Hibah	76.441.975.308,00	67.920.315.180,00	88,23
1.3.2	Pendapatan Lainnya	1.001.000.000,00	803.030.000,00	80,30
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.789.457.852.505,00	1.831.307.999.187,00	102,34

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Surakarta menyanggatkan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.789.457.852.505,00 (terrealisasi sebesar Rp.1.831.307.999.187,00atau 102,34%, dengan perincian sebagai berikut

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp.402.870.481.279,00 (terrealisasi sebesar Rp.492.764.834.440,00 atau sebesar 122,37%, terdiri dari:

i. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak daerah yang diproyeksikan sebesar Rp.222.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.279.273.759.740,00 atau sebesar 125,80%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.14
Rincian Pendapatan Pajak Daerah
Kota Surakarta Tahun 2020

No	Uraian	TA 2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Pajak Hotel	14.000.000.000,00	18.631.284.900,00	133,08
2	Pajak Restoran	28.000.000.000,00	35.789.999.426,00	127,82
3	Pajak Hiburan	5.500.000.000,00	6.083.746.884,00	110,61
4	Pajak Reklame	11.000.000.000,00	12.759.909.730,00	116,00
5	Pajak Penerangan Jalan	58.500.000.000,00	60.415.719.363,00	103,27
6	Pajak Parkir	3.000.000.000,00	3.310.614.900,00	110,35
7	Pajak Air Tanah	9.000.000.000,00	4.184.173.100,00	73,94
8	PBB	54.000.000.000,00	75.945.556.037,00	140,64
9	BPHB	45.000.000.000,00	62.152.755.400,00	138,12
	Jumlah	222.000.000.000,00	279.273.759.740,00	125,80

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020

ii. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi yang direncanakan sebesar Rp.53.410.413.141,00 terealisasi sebesar Rp.46.513.877.526,00 atau 87,09%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.15
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Per Jenis Retribusi
Kota Surakarta Tahun 2020

Uraian	TA 2020		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Retribusi Jasa Umum	25.698.273.500,00	28.156.828.051,00	109,57
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat	182.721.000,00	210.644.750,00	115,28

Uraian	TA 2020		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pelayanan Kesehatan			
1. Retribusi Pelayanan			
yang dimiliki dan/atau			
lainnya yang sejenis			
yang dikelola oleh Pemda			
2. Retribusi Pelayanan			
/Pemasokan/			
Ketersediaan			
3. Retribusi Pelayanan			
Pengukuran/			
Pemakaman			
4. Retribusi Pelayanan			
Parkir Di Tepi Jalan			
Umum			
5. Retribusi Pelayanan			
Pasar - Pelataran			
Pasar - Lm			
6. Retribusi Pelayanan			
Pasar - Kios			
7. Retribusi Pelayanan			
Ulat			
8. Retribusi Ulat			
Peningkatan			
Kebakaran			
9. Retribusi Peningkatan			
Bayar Cetak Peta			
Pengukuran Peta Dasar			
(Garis)			
10. Retribusi Pelayanan			
Tera/ Lera Ulang			
11. Retribusi Pelayanan			
Kesehatan			
Kesehatan			
Labortorium			
12. Retribusi Pelayanan			
Kendaraan Bermotor			
13. Retribusi Pelayanan			
Izin Mendapatkan			
Tenaga Kerja Asing			
(IMTA)			
b. Retribusi Jasa Usaha			
1. Retribusi Pelayanan			
Loakasan Daerah -			
Pelayanan Tanah dan			
Bangunan			

Uraian	TA 2020		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	991.300.000,00	1.026.460.500,00	103,55
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	144.650.000,00	72.200.000,00	49,91
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Alat Alat Berat	32.160.000,00	46.500.000,00	144,59
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kofas Ikan	9.535.500,00	11.692.000,00	122,51
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Depo Ikan	21.600.000,00	22.200.000,00	102,78
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pasar Ikan	137.500.000,00	0,00	0
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Rumah Potong Hewan	257.243.000,00	294.716.000,00	114,57
9. Retribusi Tempat Rekreasi	609.229.000,00	389.932.000,00	64,01
10. Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	538.742.729,00	676.232.229,00	125,52
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	33.243.500,00	35.918.000,00	108,05
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Lapangan Olahraga	39.337.500,00	60.552.500,00	153,85
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruang Diatas Saluran	0,00	87.208.800,00	
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kios/Los Diatas Tanah Pemda	24.227.940,00	17.256.600,00	71,23
C. Retribusi Perizinan Tertentu	15.768.148.000,00	8.604.790.700,00	54,57
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15.618.148.000,00	8.324.779.700,00	53,30
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	100.000.000,00	180.000.000,00	180,00

No	Uraian	Dasar Hukum	TA 2020		%
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PIJAK	Peralatan Kantor Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah		2.850.809.311,00	100
2	Bank Jawa Tengah	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSB) tahun 2018	7.913.484.748,00	7.913.484.748,00	100

Tabel 1.16
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Surakarta Tahun 2020

iii. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 12.533.051.358,00 terealisasi sebesar Rp. 12.497.651.358,00 atau 99,72%. Merupakan realisasi atas pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan periode (angka) 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/ BUMD. Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Berkas			
3. Retribusi izin gangguan tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi	0,00	0,00	0
4. Penerimaan Perpanjangan IRTA kepada Pembiat Kerja Tenaga Kerja Asing - LR	0,00	0,00	0
5. Retribusi Ijin Trayek kepada pribadi	50.000.000,00	1.114.000,00	220,16

Sumber: RPPKAD Kota Surakarta, 2020

No	Uraian	Dasar Hukum Realisasi TA 2019	TA 2020		%
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
3	PD BPR Bank Solo	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Bank Solo	1.269.965.048,00	1.269.965.048,00	100
4	PD Pedaringan	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah "Pedaringan" Kota Surakarta	463.392.251,00	463.392.251,00	100
5	ISTJ	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.	35.400.000,00	0,00	0
6	PD BPR BKK Pasar Kliwon		0,00	0,00	0
		Jumlah	12.533.051.358,00	12.497.651.358,00	99,72

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020

iv. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dari sisi Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 114.927.016.780,00 terealisasi sebesar Rp.154.479.545.816,00 atau 134,42%. Merupakan realisasi atas pendapatan daerah dari Lain-lain PAD yang Sah periode dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, yang terdiri dari:

Merupakan realisasi atas pendapatan bagi hasil pajak dan

1. Transfer Pemerintah Pusat

dari:

Penjualan transfer direncanakan sebesar 1.249.819.659.567,00
 realisasi sebesar 1.308.605.395.918,00 atau 97,64%. Merupakan
 realisasi atas pendapatan transfer dari tanggal 1 Januari 2020
 sampai dengan 31 Desember 2020. Pendapatan transfer terdiri

b. Pendapatan Transfer

Sumber: BUKAD Kota Surakarta, 2020

No	Uraian	TA 2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	132.103.316,00	1.249.819.659.567,00	110,28
2	Penerimaan Jasa Lain	5.944.533.424,00	12.490.171.158,00	209,23
3	Penerimaan Bunga	0,00	0,00	0
4	(Unitas Ganti Kerugian Lain) (TGR)	304.595.025,00	648.689.418,00	209,69
5	Pendapatan (Pendapatan) Kewajiban Pelanggaran Pekerjaan	0,00	59.099.259,00	
6	Pendapatan Renda Pajak	219.708.300,00	219.763.300,00	100,15
7	Pendapatan Renda Berbasis	101.057.396,00	140.104.994,00	138,69
8	Pendapatan dan Pengembalian	0,00	0,00	0
9	Kegiatan Sosial dan Fasilitas Umum	1.300.000.000,00	976.205.880,00	75,14
10	Pendapatan dan Anggaran/Catatan Penjualan	103.546.651.757,00	137.519.611.695,00	132,84
11	Pendapatan BLUD	1.101.553.340,00	185.182.302,00	16,77
12	Lain-lain PAD yang Sui Lainnya	620.000.000,00	808.256.420,00	130,37
13	Pendapatan BOS	0,00	50.163.890,00	
14	Hasil dari Penanaman Kekayaan Daerah	453.811.720,00	401.847.720,00	88,76
	Lain-lain PAD yang Sui	114.927.016.780,00	154.479.543.806,00	134,42

bagi hasil bukan pajak dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

a. Dana bagi hasil pajak

Secara rinci, pendapatandana bagi hasil pajak dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.18
Rincian Dana Bagi Hasil Pajak
Kota Surakarta Tahun 2020

No	Uraian	TA 2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan/Perkotaan	4.113.998.208,00	3.677.520.452,00	89,35
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	45.449.183.939,00	46.718.507.853,00	102,79
3	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau	6.853.481.000,00	6.514.487.496,00	95,05
	Jumlah	56.418.663.147,00	56.910.515.801,00	100,87

Sumber: BPPKAI Kota Surakarta, 2020

b. Dana bagi hasil bukan pajak/ Sumber Daya Alam

Secara rinci, pendapatandana bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.19
Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA
Kota Surakarta Tahun 2020

No	Uraian	TA 2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0,00	176.927.550,00	
2	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	343.357.819,00	9.607.000,00	2,80

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Surakarta sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : S-702/MK.07/2019 perihal Penyalpaan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan dana Desa TA.2020 tanggal 24 September 2019 Pemerintah Kota Surakarta mendapat lanjut dengan menggunakan

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020

No	Uraian	TA 2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Dana Alokasi Umum	813.720.310.000,00	794.665.771.000,00	97,66
	Jumlah	813.720.310.000,00	794.665.771.000,00	97,66

Rincian Data Alokasi Umum
Kota Surakarta Tahun 2020

Tabel 1.20

c. Dana Alokasi Umum

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020

No	Uraian	TA 2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
3	Bagi Hasil Dari Tunggian Penghasilan Perikanan	0,00	3.677.289,00	
4	Bagi Hasil Dari Tunggian Hasil Perikanan	1.588.988.903,00	781.544.000,00	49,28
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	48.314.673,00	20.494.885,00	42,52
6	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	143.298.969,00	711.359.253,00	490,41
7	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	40.889.772,00	38.125.284,00	93,23
8	Bagi Hasil Dari Pertambangan Lumber	1.051.095,00	511.153,00	48,63
	Jumlah	2.166.098.229,00	1.780.898.008,00	82,22

dalam Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 107).

Dengan adanya pandemi COVID 19 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rangka Penanganan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020. Terbitnya peraturan ini mengakibatkan dilakukannya perubahan (refocusing) Dana Alokasi Umum.

d. Dana Alokasi Khusus

Secara rinci, pendapatan dana alokasi khusus dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.21
Rincian Dana Alokasi Khusus per Rincian Objek

No	Uraian	TA 2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	6.657.800.000,00	6.657.800.000,00	100
2	DAK Bidang Kesehatan	10.583.371.000,00	10.194.192.512,00	96,30
3	DAK Bidang Pertanian	0,00	0,00	0
4	DAK Bidang	7.720.326.000,00	7.559.241.000,00	97,91

No	Uraian	TA 2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Tujuan/Proses Guru PNSD	108.151.232.000,00	108.151.232.000,00	100
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	385.140.000,00	
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	10.901.400.000,00	10.268.334.903,00	94,19
4	Bantuan Operasional Kesehatan	9.194.186.000,00	26.553.814.271,00	289,61
5	Jalan/Persalinan	100.852.000,00	0,00	0
6	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.439.122.000,00	1.386.860.658,00	96,37
7	Dana Pelayaran Admistrasi Kependudukan	1.851.348.000,00	1.791.512.170,00	96,77

per Rincian Objek

Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Tabel 1.22

fisik dapat dirinci sebagai berikut:

Secara rinci, pendapatan dana alokasi khusus non

e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Sumber: RPKAD Kota Surakarta 2020

No	Uraian	TA 2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
5	DAK Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0
6	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	10.552.907.000,00	10.552.906.178,00	100
7	DAK Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	0,00	0,00	0
8	DAK Pemukiman	4.905.692.000,00	4.582.787.108,00	93,42
	Jumlah	40.422.096.000,00	39.546.926.738,00	97,83

No	Uraian	TA 2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
8	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Tari dan Budaya	700.000.000,00	524.973.700,00	75
9	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	491.010.000,00	467.507.025,00	95,21
10	Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	236.552.400,00	68,76
11	Akreditasi Puskesmas	985.280.000,00	0,00	0
12	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.521.900.000,00	2.453.450.000,00	97,29
13	Pengawasan obat dan makanan	55.819.000,00	0,00	0
14	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Tenaga Kesehatan	9.397.378.730,00	0,00	0
	Jumlah	146.133.597.730,00	152.219.337.625,00	104,16

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020

ii. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Merupakan realisasi atas dana transfer pemerintah pusat - lainnya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, yang terdiri dari :

Tabel 1.23
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

No	Uraian	TA 2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Dana Penyesuaian	61.860.673.000,00	61.860.673.000,00	100
2	Jumlah	61.860.673.000,00	61.860.673.000,00	100

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020

iii. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Merupakan realisasi atas transfer Pemerintah Provinsi Jawa

iv. Bantuan Keuangan

Merupakan realisasi atas bantuan keuangan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, dianggarkan sebesar Rp. 32.553.000,00 terrealisasi sebesar Rp30.761.773.579,00 yang terdiri dari :

Sumber: RPK412 Kota Surakarta, 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak, terdiri dari :			
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	57.902.298.300,00	51.298.779.797,00	88,60
2	Bagi Hasil Part Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	37.394.485.584,00	19.810.801.051,00	52,98
3	Bagi Hasil Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.927.473.160,00	25.479.499.222,00	72,91
4	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan dan Pembebasan Air Perumahan	32.951.185,00	29.987.512,00	91,01
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	25.065.748.484,00	35.159.701.234,00	141,48

Tabel 1.24
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tengah dalam bentuk pendapatan bagi hasil pajak dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, yang terdiri dari:

Tabel 1.25
Bantuan Keuangan Tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bantuan keuangan kepada Kota Surakarta Ta. 2020	553.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Sapras Backdrop Open Stage Taman Balekambang	326.684.200,00
3	Bantuan keuangan pembangunan Gor Indoor Manahan (Lanjutan)	20.109.992.600,00
4	Bantuan Keuangan Propinsi untuk Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Nusukan	138.487.800,00
5	Bantuan Propinsi untuk Penataan JL. Dr. Radjiman	167.736.000,00
6	Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Kota Surakarta untuk pembangunan Bank sampah (Tahap I)	60.000.000,00
7	Bantuan Keuangan Tahap II untuk 5 Kegiatan Propinsi	9.405.872.979,00

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 77.981.975.308,00 terealisasi sebesar 68.723.505.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

i. Pendapatan Hibah

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan hibah tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.26
Pendapatan Hibah Tahun 2020

No	Uraian	TA 2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
	Pendapatan Hibah	76.981.975.308,00	67.920.505.180,00	88,23
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	28.732.130.000,00	20.459.204.504,00	71,21
2	Pendapatan Hibah dari BOS	48.249.845.308,00	47.461.300.676,00	98,37

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020

Belanja Pendapatan lainnya merupakan pendapatan hibah dari kelompok masyarakat yang mengalokasikan sebesar Rp1000.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp803.400.000,00. Pendapatan hibah ini merupakan hibah masyarakat untuk pendirian Covid-19 yang tercatat di Dinas Sosial selaku perangkat daerah yang secara fungsional menanggung Pandemi Covid-19, hal ini merupakan tindak lanjut dari kebutuhan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa penggunaan langsung sumbangan penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang dilakukan tanpa

No	Uraian	TA 2020	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Lainnya	1.000.000.000,00	803.400.000,00
		80,34	

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020

Tabel 1.27
Pendapatan Lainnya Tahun 2020

sebagai berikut:
Rincian anggaran dan realisasi pendapatan lainnya tahun 2020

ii. Pendapatan Lainnya

Realisasi Pendapatan dari pemerintah sebesar Rp67.902.505.180,00 merupakan realisasi Hibah Partisipasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp20.390.204.504,00 dan Hibah Sumbasi (SALIC I) sebesar Rp69.000.000,00 sedangkan Hibah BOS teralisasi sebesar Rp47.461.300.676,00 merupakan pendapatan yang langsung diterima dari Pemerintah Provinsi ke Rekening Sekolah Pemerintah Dana BOS tidak melalui RKUD.

terlebih dahulu disetor ke RKL. Secara analogis di terapkan dalam belanja daerah. Yang kemudian di tindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Walikota Surakarta Nomor 37 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3.6 REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Kinerja belanja daerah tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.28
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2020

NO	BELANJA DAERAH	JUMLAH ANGGARAN(Rp)	REALISASI	%
	BELANJA	1.885.698.744.826,00	1.638.665.726.421,00	86,90
I	Belanja Operasi	1.446.695.853.389,00	1.349.814.240.936,00	93,30
	1) Belanja Pegawai	735.735.797.290,00	704.230.650.525,00	95,72
	2) Belanja Barang dan Jasa	627.982.903.099,00	575.188.331.571,00	91,59
	3) Belanja Bunga	28.000.000,00	25.848.104,00	92,31
	4) Belanja Hibah	67.596.591.000,00	56.318.431.236,00	83,32
	5) Belanja Bantuan Sosial	15.353.162.000,00	14.050.979.500,00	91,52
II	Belanja Modal	285.769.230.150,00	250.969.805.187,00	87,82
	1) Belanja Modal Tanah	15.000.000.000,00	14.451.419.775,00	96,34
	2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.558.513.809,00	78.671.370.430,00	91,93
	3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.822.357.865,00	106.990.295.080,00	81,78
	4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.969.831.494,00	45.588.054.261,00	93,09
	5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.418.526.962,00	5.268.665.641,00	97,23
III	Belanja Tak Terduga	153.233.661.237,00	37.881.680.298,00	24,72

Sumber: BPTKAD Kota Surakarta, 2020

Permasalahan utama belanja daerah adalah adanya ketidakseimbangan antara besarnya pendapatan daerah dengan rencana kebutuhan belanja daerah. Dana perimbangan dari pemerintah pusat dan bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi masih sangat dominan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2020.

Surakarta menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp.1.885.698.744.826,00 teralisasi sebesar Rp.1.638.665.726.421,00 atau

Dalam APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota

APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020.

910/505 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Surakarta dengan DPRD Kota Surakarta Nomor 910/1457 dan Nomor Tahun Anggaran 2020 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Nomor 910/1456 dan Nomor 910/504 tentang Kebijakan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 22 Juli 2020 serta Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Anggaran Sementara APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020, Nomor 910/3226 dan Nomor 910/7140 tentang Prioritas dan Plafon antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surakarta Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 dan Nota Kesepakatan 910/7139 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Surakarta tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 910/3225 dan Nomor Pemerintah Kota Surakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah daerah dengan berpedoman pada Nota Kesepakatan antara kinerja kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabjakan belanja daerah dipergunakan untuk mendukung

pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah.

penyesuaian penganggaran belanja daerah terhadap kebutuhan dengan pencegahan dan penanganan Covid-19 berdampak pada Operasional Sekolah Reguler serta penyesuaian penganggaran terkait pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat (TKD), memperhitungkan pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap pendapatan, Perubahan prediksi penerimaan pendapatan daerah dengan

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2020.

Belanja Daerah sesuai Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rencana daerah Tahun 2020, tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang $\pm 12,31\%$ dari pendapatan

86,90%. Secara rinci Belanja Daerah APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.29
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN(Rp)	REALISASI	%
	Belanja Operasi	1.446.695.853.389,00	1.349.814.240.936,00	93,30
1	Belanja Pegawai	735.735.797.290,00	704.230.650.525,00	95,71
2	Belanja Barang dan Jasa	627.982.303.099,00	575.188.331.571,00	91,59
3	Belanja Bunga	28.000.000,00	25.848.104,00	92,31
4	Belanja Hibah	67.596.591.000,00	56.318.431.236,00	83,32
5	Belanja Bantuan Sosial	15.353.162.000,00	14.050.979.500,00	91,52

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.446.695.853.389,00 terealisasi sebesar Rp.1.349.814.240.936,00 atau 93,30%. Pos Belanja Operasi terdiri dari :

i. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp.735.735.797.290,00 terealisasi sebesar Rp.704.230.650.525,00 atau 95,72%. Belanja pegawai dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, belanja biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan serta belanja insentif pemungutan retribusi daerah.

ii. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.627.982.303.099,00 terealisasi sebesar Rp.575.188.331.571,00 atau sebesar 91,59% dalam rangka pemenuhan belanja barang dan jasa pada OPD/Unit Kerja.

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020

NO	BELANJA DAERAH	JUMLAH ANGGARAN(Rp)	REALISASI	%
1	Belanja Modal Tanah	15.000.000.000,00	14.451.419.275,00	96,34
2	Belanja Modal	285.769.230.150,00	250.969.805.187,00	87,82
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan dan Bangunan	130.823.957.845,00	106.990.295.080,00	81,78
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan	48.969.831.494,00	45.588.054.261,00	93,09
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.418.526.982,00	5.268.665.641,00	97,23

Tabel 1.30
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020

sebagai berikut:

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2020 adalah

b. Belanja Modal

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.15.353.162.000,00 terealisasi sebesar Rp.14.050.979.500,00 atau 91,52%, digunakan untuk belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial dan kemasyarakatan, belanja bantuan sosial kepada masyarakat, belanja bantuan sosial beasiswa dan bantuan sosial tidak berencana.

v. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi belanja hibah dianggarkan sebesar Rp. 67.596.591.000,00 terealisasi sebesar Rp.56.318.431.246,00 atau 83,32% yaitu untuk belanja hibah kepada pemerintah, belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan, ROP PALD masyarakat/swasta dan belanja hibah kepada penyelenggara hotel dan restoran.

iv. Belanja Hibah

Belanja bunga untuk membayar bunga utang pinjaman kepada pemerintah dianggarkan Rp.28.000.000,00 terealisasi Rp.25.848.104,00 atau 92,31%.

iii. Belanja Bunga

c. Belanja Tidak Terduga

Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.31

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020

NO	BELANJA DAERAH	JUMLAH ANGGARAN(Rp)	REALISASI	%
	Belanja Tak Terduga	153.233.661.287,00	37.881.680.298,00	24,72

Sumber: RPPKAD Kota Surakarta, 2020

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam anggaran sebesar Rp.153.233.661.287,00 terealisasi sebesar Rp.37.881.680.298,00 atau 24,72%. Alokasi dana tak terduga mengalami kenaikan sebagaimana kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19.

Alokasi Belanja Tidak Terduga, mengalami kenaikan mempedomani kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemik COVID-19 sebagaimana tertuang dalam:

1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa dalam langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga, dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease di lingkungan pemerintah daerah, bahwa penggunaan belanja tidak terduga melalui pengajuan rencana Kebutuhan Belanja (RKB) diprioritaskan untuk: (a) penanganan kesehatan; (b) penanganan dampak ekonomi; dan (c) penyediaan *social safety net*/ jaring pengaman sosial antara lain pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai.

3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KAB.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Raih Masyarakat dan Perkecukupan Nasional, bahwa selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dan penyesuaian belanja digunakan untuk: (a) belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19; (b) penyediaan jaring pengaman sosial / *sosial safety net*; dan (c) penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
6. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 119/3039/SJ dan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

1.3.7 REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Kinerja pembiayaan daerah tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.32
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN(Rp)	REALISASI	%
	Pembiayaan Daerah	97.240.392.321,00	100.251.766.587,26	103,10
1	Penerimaan Pembiayaan	105.310.864.321,00	106.322.238.921,26	102,86
a	Penggunaan SILPA	105.310.864.321,00	105.310.864.321,26	100,00
b	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	11.374.200,00	
c	Penerimaan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	
d	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	3.000.000.000,00	
2	Pengeluaran Pembiayaan	8.070.472.000,00	8.070.471.934,00	100
a	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.626.000.000,00	7.626.000.000,00	100
b	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri	444.472.000,00	444.471.934,00	100
c	Pengembalian pada pihak Ketiga	0,00	0,00	0

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, 2020

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Surakarta mengalokasikan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 97.240.392.321,00 terealisasi sebesar Rp.100.251.766.587,26 atau 103,10%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

i. Penggunaan SILPA

Penggunaan SILPA tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.105.310.864.321,00 terealisasi sebesar Rp. 105.310.864.321,00 atau 100%.

ii. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Merupakan realisasi penerimaan kembali pinjaman daerah, dianggarkan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp.

- 11.374.200,00 merupakan pengembalian atas dana pemberian pinjaman pokok dana bergulir Dinas Koperasi dan UKM periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
- iii. Penerimaan dari Pajak Keluaga
- Tidak ada realisasi penerimaan dari pajak keluga pada tahun 2020.
- iv. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal
- Merupakan realisasi penerimaan kembali penyertaan modal periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Penerimaan kembali investasi permanen dianggarkan sebesar Rp.0,00 terrealisasi sebesar Rp. 3.000.000.000,00, merupakan penerimaan atas pengurangan modal pada ISII sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Juang Surakarta
- b. Pengeluaran Pembayaan dengan rincian sebagai berikut:
- i. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- Penyertaan Modal pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp.2.626.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp.2.626.000.000,00 berdasarkan pada Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- ii. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp. 444.472.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 444.472.000,00 merupakan Pokok Utang yang jatuh tempo kepada Pemerintah Kota Surakarta sesuai RDA-304/DP3/1990 yang jatuh tempo tanggal 15 Maret 2020.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD

APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya, sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surakarta tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 910/3225 dan Nomor 910/7139 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surakarta tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 910/3226 dan Nomor 910/7140 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020, dengan merujuk pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2020.

Sesuai ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 memerlukan Perubahan APBD Tahun 2020 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah

2. Perubahan prediksi penerimaan pendapatan daerah dengan memperhitungkan pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap pendapatan; pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Pencapaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SLPLA) tahun anggaran 2019;
3. Penyesuaian penganggaran belanja daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah, serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
4. Penyesuaian penganggaran terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19;
5. Penyesuaian target kinerja dan hasil yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pengeseran anggaran tahun 2020.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2020 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro dan diunduk permasalahan di masyarakat, sehingga dibahas pada struktur APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020.

I. PERUBAHAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH **a. Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.306.270.465.006,00 atau 15,16% dari anggaran semula sebesar Rp.2.019.861.148.959,00 menjadi sebesar Rp.1.713.590.683.953,00 karena adanya penyesuaian pendapatan akibat Pandemi (Corona Virus Disease 2019) (COVID-19) dengan memperdomnai peraturan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang sebesar Rp.239.078.369.216 atau 39,17 % dari anggaran semula sebesar Rp.610.373.869.673,00 menjadi Rp. 371.295.500.457, Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari penurunan pendapatan alas Tajak daerah sebesar Rp.148.000.000.000,00, Kontribusi daerah sebesar Rp.24.615.530,069,10 dan Lain-lain PAD yang satu sebesar Rp.64.733.717.535,75 serta pendapatan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.1.729.121.611,00.

Dana Perimbangan berkurang sebesar Rp. 94.403.376.625,00 atau 8,22 % anggaran semula sebesar Rp.1.148.576.963.000,00 menjadi sebesar Rp.1.054.173.386.375,00. Penurunan Dana Perimbangan menyesuaikan dengan alokasi rincian dana transfer kepada Kabupaten/ Kota mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Memhahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penambahan Rp.27.211.480.835,00 atau naik 10,43% dari anggaran semula Rp. 260.910.316.286,00 menjadi Rp. 288.121.797.121,00. Kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, menyesuaikan dengan alokasi pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi dan pendapatan hibah

b. Permasalahan Umum Pendapatan Daerah

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pandemi ini membuat pemerintah daerah dan pemerintah pusat, harus mencampuh kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, yang mengubah hampir semua asumsi dalam APBD Tahun 2020.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, mengamanatkan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD, penyesuaian belanja daerah, pendanaan belanja bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi agar

dunia usaha tetap hidup yang bersumber dari sebisnis penyediaan target pendapatan daerah dengan penyesuaian belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah sangat berpengaruh sebagai akibat menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian terkait kebijakan dalam penanganan pandemi virus corona desase 2019 (COVID-19).

Pendapatan dana Transfer yang masih mendominasi sebagai sumber pendapatan pada APBD Tahun 2020 juga terkoreksi sesuai dengan rincian alokasi dana Transfer ke Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

- c. Ketepatan Umum Perubahan Pendapatan Daerah
 - Kebijakan umum pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dialokasikan pada :
 1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan :
 - a. Perkiraan berdasarkan potensi yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2020;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
 - f. Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2019, berdasarkan :

- 1) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 539/ 45 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perhitungan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Tahun 2019;
 - 2) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 539/621 Tahun 2020 tentang Pengesahan Neraca Dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta Tahun 2019;
 - 3) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 539/46 Tahun 2020 tentang Pengesahan Neraca Dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jarug Surakarta Tahun 2019;
 - 4) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 539/ 40.1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2019.
- g. Penyesuaian pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah berdasarkan :
- 1) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10-B Tahun 2013 tentang Tarif Layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;
 - 2) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah BUNG KARNO Kota Surakarta.
2. Penyesuaian Dana Perimbangan dengan mempertimbangkan :
- a. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran

2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Menimbulkan Pergerakan Nasional.

- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun 2020.

3. Penyesuaian lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, mempertimbangkan :

- a. Penyesuaian pendapatan Hibah Dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020

- b. Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/053/2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Perencanaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/01.262 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pemberitahuan Kurang Solut Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun 2019.

- c. Penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0001344 Tanggal 24 Desember 2019 tentang Penempatan Alokasi Belanja Bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/ Kota dan Kecamatan Desa.

II. PERUBAHAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

- a. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah

Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada respon atas issue dominan tahun 2020, yaitu penanganan Pandemi COVID-19, evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan sampai dengan semester I Tahun Anggaran 2020 yang telah diakomodir dalam ijin mendahului Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 serta prognosis APBD Tahun Anggaran 2020 semester II.

Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.3.086.270.465.000,00 atau 15,57% dari anggaran semula sebesar Rp. 2.019.290.676.959,00 Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam kelompok belanja sebagai berikut :

(i) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung, dari anggaran semula sebesar Rp.919.650.687.209,00 menjadi sebesar Rp.941.364.513.077,00 mengalami peningkatan Rp.21.713.825.868,00 atau 2,36% dengan perincian:

i. Belanja Pegawai

Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp. 731.526.089.793,00 dari anggaran semula sebesar Rp. 823.070.525.209,00 mengalami penurunan sebesar Rp.91.544.435.416,00 atau turun 11,12%.

ii. Belanja Bunga

Belanja bunga dari anggaran semula Rp.28.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

iii. Belanja Hibah

Belanja hibah turun sebesar Rp.20.606.800.000,00 atau 30,26%, dari anggaran semula sebesar Rp.68.090.900.000,00 menjadi sebesar Rp.47.484.100.000,00

iv. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp. 8.093.162.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.25.461.762.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp.17.368.600.000,00 atau 68,21%

v. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik, sebesar Rp.999.500.000,00, tetap tidak mengalami perubahan.

64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (PRL) dengan mempedoman Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;

- d) Mengakomodir kebijakan pemerintah pusat, dalam rangka percepatan penanganan dampak COVID-19, dengan mempedomani :
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19;
 - ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19;
 - iii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transier ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19;
 - iv. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/28.13/Sj Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 - v. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/ atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
3. Menyesuaikan penganggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah (MOS) Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020;

5. Menyesuaikan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, melalui him mendahulukan perubahan yang telah beberapa kali dilakukan, melalui :
 - a) Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019;
 - b) Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019;
 - c) Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019;
 - d) Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019;
 - e) Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019;
 - f) Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019.
 6. Menyesuaikan penetapan Sisa Labih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SLPA) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019;
 7. Penyesuaian target indikator kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II melalui pengesahan anggaran, penambatan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
 8. Menyesuaikan kebijakan penganggaran belanja sebagai tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019.
- Operasional kebijakan belanja, turunan dari kebijakan umum dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, meliputi :
1. Penggunaan SLPA
 - a. SLPA terkait ditamakan untuk menganggarkan kembali sisa anggaran yang berasal dari:
 - 1) Saldo Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

- 2) Saldn Biaya Operasional Sekolah (BOS);
 - 3) Sisa dana transfer yang berasal dari DAK dan DBHCHT.
 - b. SILPA tidak terikat dialokasikan untuk pembiayaan belanja daerah lainnya.
 - c. Mendanai kegiatan-kegiatan mendesak melalui mekanisme mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, meliputi :
 - 1) Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Perwali Nomor 55 Tahun 2019;
 - 2) Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 55 Tahun 2019;
 - 3) Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perwali Nomor 55 Tahun 2019;
 - 4) Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Perwali Nomor 55 Tahun 2019;
 - 5) Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Perwali Nomor 55 Tahun 2019;
 - 6) Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Perwali Nomor 55 Tahun 2019.
2. Kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, secara umum difokuskan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, antara lain untuk .
- a. Belanja Rekening air, listrik dan telepon;
 - b. Belanja upah TKPK
 - c. Belanja Outsourcing;
 - d. Belanja Jasa Keamanan (Liburtas);
 - e. Premi BPJS Kesehatan (PBI)
3. Belanja Tidak Langsung
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Gaji PNS dihitung memperhatikan realisasi gaji sampai dengan bulan Juni 2020, termasuk mengakomodir penyesuaian alokasi gaji dan tunjangan PNS di setiap OPD dan unit kerja, yang disebabkan oleh adanya mutasi, pensiun

dan penyesuaian tunjangan kepada tenaga teknis dalam rangka penangguhan COVID-19;

- 2) Mengakomodir pemberian Tunjangan Hari Raya kepada PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pemerintah Pusat atau Tunjangan;
- 3) Mengakomodir pemberian Gaji ke-13 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pemerintah Pusat atau Tunjangan;
- 4) Penyesuaian anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai PNS Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dan Surat Keputusan Walikota Nomor 840 / 55.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 840 / 11.1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

- 5) Penyesuaian insentif pajak dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Penugasan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 973/6043/keuda Tanggal 28 November 2019 tentang Insentif Penugasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas penugasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dipertimbangkan sebagai salah satu

unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

Penyesuaian belanja hibah dan bantuan sosial, sesuai dengan kebijakan refocusing, dan realokasi belanja untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 sebagaimana terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* di lingkungan pemerintah daerah.

c. Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga, mengalami kenaikan mempedomani kebijakan relocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemik COVID-19 sebagaimana tertuang dalam:

- 1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa dalam langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga, dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- 2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* di lingkungan pemerintah daerah, bahwa penggunaan belanja tidak terduga melalui pengajuan rencana Kebutuhan Belanja (RKB) diprioritaskan untuk: (a) penanganan kesehatan; (b) penanganan dampak ekonomi; dan (c) penyediaan *social safety net*/ jaring pengaman sosial antara lain pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai.

- 3) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, bahwa selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dan penyesuaian belanja digunakan untuk: (a) belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19; (b) penyediaan jalur pengaman sosial / social safety net; dan (c) penanganan dampak ekonomi terutama usaha agar daya usaha tetap hidup.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Penputrahan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- 5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- 6) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 119/3039/SJ dan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Lindak Lanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 7) Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Barang/Jasa Pemerintah Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

4. **Belanja Langsung**

- a. Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber pada pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempedomani kebijakan refocusing dan realokasi belanja untuk penanganan COVID-19;
- b. Penyesuaian sasaran dan target indikator kinerja kegiatan Program/kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II;
- c. Penyesuaian standarisasi belanja mengacu pada Keputusan Walikota Surakarta Nomor 065/230 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 065/367 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surakarta Nomor 065/230 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020;
- d. Penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari dana transfer pusat mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19, khususnya atas sumber dana DAI, DAK (fisik dan non fisik), dan Dana Insentif Daerah (DID);
- e. Penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari DBH pajak dan DBH CHT sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- f. Mengakomodir pelaksanaan kegiatan mendesak yang telah dianggarkan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- g. Perencanaan anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya secara administratif dan fisik harus memperhatikan akhir pembayaran minggu ke - 2 bulan Desember 2020;
- h. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan batas waktu pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2020 paling lambat 31 Desember 2020;

1. Paket-paket pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa memperhatikan nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Pembayaran paket-paket pengadaan barang dan jasa berdasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- g. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.07 /2020 tentang Penggunaan, Penatausahaan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, bahwa DBH-CHT digunakan untuk mendanai program: (1) peningkatan kualitas bahan baku; (2) pembinaan industri; (3) pembinaan lingkungan sosial; (4) sosialisasi ketertarikan di bidang cukai dan/ atau (5) pembencanaan barang kena cukai ilegal. Program diprioritaskan pada bidang jaminan kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari DBH-CHT yang diterima pada tahun berikutnya ditambah sisa DBH-CHT tahun sebelumnya.
- h. Penyesuaian Belanja BLUD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019.
- m. Belanja pegawai
- n. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Penganggaran belanja barang dan jasa dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, menggunakan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta mengoptimalkan anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19;
- 2) Penganggaran belanja barang dan jasa dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, menggunakan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta mengoptimalkan anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19;

Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/28.13/Sj dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

- 2) Penyesuaian belanja operasi dalam jenis belanja barang dan jasa dengan melakukan perubahan output kegiatan, addendum kontrak dan pergeseran anggaran.
- 3) Lebih lanjut penyesuaian atas rasionalisasi belanja operasi atas bahan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, selanjutnya ditampung dalam KUPA-PPAS Tahun 2020, khususnya untuk : pemenuhan belanja rekening air, listrik dan telepon, kekurangan upah TKPK, kekurangan anggaran outsourcing, kekurangan honor tenaga keamanan (Linmas) dan kekurangan premi asuransi BPJS Kesehatan, khususnya untuk PBL.

n. Belanja Modal

- 1) Penganggaran belanja modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, mengkomodit dan mempedomani Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/28.13/Sj, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19.
- 2) Penyesuaian belanja modal atas SKB menteri ini, atas beberapa pekerjaan belanja modal khususnya konstruksi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 hanya akan dibayarkan sebagian dari nilai kontrak, selanjutnya kekurangannya akan diakui sebagai utang jangka pendek dan dibayarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Rincian kegiatan tersebut mempedomani Keputusan Walikota Nomor 913/67.1 Tahun 2020 tentang Kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan dibayar bertahap sebagai dampak Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19)

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2020.

d. Prioritas dan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Total pagu anggaran Belanja langsung dari anggaran
semula sebesar Rp.1.189.639.989,750,00 menjadi sebesar Rp.869.466.553,00
mengalami penurunan sebesar Rp.320.173.426.553,00 atau 26,91%.
Perubahan alokasi belanja langsung atas kelompok urusan masing-masing
sebagai berikut :

- a. Belanja langsung urusan wajib pelayanan dasar dari anggaran
semula sebesar Rp.626.191.832.647,00 menjadi sebesar
Rp.548.312.768.616,00 turun sebesar Rp.77.879.063.991,00 atau
14,20%.
- b. Belanja langsung urusan wajib bukan pelayanan dasar dari
anggaran semula sebesar Rp.322.183.297.872,00 menjadi sebesar
Rp.195.201.793.339,00 turun sebesar Rp.126.981.504.533,00 atau
39,41%.
- c. Belanja langsung urusan pilihan dari anggaran semula sebesar
Rp.49.028.086.442,00 menjadi sebesar Rp.23.549.007.770,50 turun
sebesar Rp.25.479.078.671,50 atau 51,97%.
- d. Belanja langsung urusan pemerintahan fungsi pemangku dari
anggaran semula sebesar Rp.192.236.772.829,00 menjadi sebesar
Rp.102.402.993.471,50 turun sebesar Rp.89.833.779.357,50 atau
46,73%.

Yang selanjutnya secara terinci pagu per bidang meliputi :

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
- 1) Urusan Wajib Bidang Pendidikan, anggaran semula
sebesar Rp.173.778.891.819,00 menjadi sebesar
Rp.164.160.127.175,00 mengalami penurunan sebesar
Rp.9.618.764.644,00 atau 5,54% sedangkan dalam rancangan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, salah satu
mekanisme pemenuhan atas kekurangan upah GPP/PTT
dan belajar operasional sekolah.
- 2) Urusan Wajib Bidang Kesehatan, anggaran semula
sebesar Rp.195.549.514.315,00 menjadi sebesar

Rp.218.984.594.565,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 23.433.080.250,00 atau meningkat 11,98% yang dialokasikan untuk belanja Premi Asuransi Kesehatan untuk warga miskin/ Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang bersumber dari APBD, DBHCHT dan DAU Tambahan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional serta penyesuaian belanja BLUD dengan mempertimbangkan saldo kas BLUD Tahun Anggaran 2019.

- 3) Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, anggaran semula sebesar Rp.171.404.400.029,00 menjadi sebesar Rp.108.969.750.177,00 mengalami penurunan sebesar Rp.62.434.649.852,00 atau 36,43 % akibat penyesuaian atas rasionalisasi belanja modal, namun demikian terdapat pemenuhan untuk belanja rekening listrik PJU dan penyelesaian pembangunan jembatan *underpass* transito serta penyusunan DED DAK bidang PUPR untuk Tahun Anggaran 2021.
- 4) Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, anggaran semula sebesar Rp.19.474.857.769,00 menjadi sebesar Rp.14.342.468.303,00 mengalami penurunan sebesar Rp.5.132.389.466,00 atau 26,35%, namun demikian terdapat tambahan dalam Perubahan APBD 2020 untuk pemeliharaan jalan lingkungan untuk 2 paket, penataan sarana prasarana Makam Bonoloyo dan Purwoloyo, jalan dan Drainase PLA Mojosoongo, Pembangunan Talud Putri Cempo dan penyusunan DED HP 16, DED usulan DAK bidang Perkin dan DED Sambungan Rumah (SR) Master Meter.
- 5) Urusan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, anggaran semula sebesar Rp.51.093.380.675,00 menjadi sebesar Rp.32.904.865.739,00 mengalami penurunan sebesar Rp.18.188.514.936,00 atau 35,60%, salah satunya adalah penundaan gedung BPPD tahap II. Namun demikian terdapat tambahan dalam

perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pemenuhan honor Linmas dan tenaga keamanan (TKPK) yang terkena rasionalisasi 50% serta penataan hunian bar untuk mendukung pembangunan stadion baru yang akan di kerjakan oleh Pemerintah Pusat di Kelurahan Nusukan.

6) Urusan Wajib Bidang Sosial, anggaran semula sebesar Rp.14.890.788.000,00 menjadi sebesar Rp.8.950.962.657,00 mengalami penurunan sebesar Rp.5.939.825.343,00 atau 39,89%, namun demikian terdapat pemenuhan belanja operasional untuk Pant Wreda dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- 1) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja, anggaran semula sebesar Rp.3.658.672.000,00 menjadi sebesar Rp.2.657.652.981,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.001.019.019,00 atau 27,36% akibat pengurangan belanja operasi kegiatan Dilat bagi pencari kerja dan wirasaba baru, pemenuhan kegiatan *job fair* dan pemenuhan pameran produk IKM.
- 2) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, anggaran semula sebesar Rp.7.239.922.000,00 menjadi sebesar Rp.2.394.031.770,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.4.845.890.230,00 atau 66,93% akibat pengurangan biaya operasi Forum Anak, Pokja Kota Layak Anak dan Pusat Pelayanan Terpadu, Program P2MBC dan Pelatihan Keterampilan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) serta rasionalisasi belanja operasional PKK Kelurahan sebesar 50%, yang di dalamnya termasuk untuk operasional PKK RT, PKK RW, Posyandu Lansia dan Posyandu Balita.
- 3) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan, anggaran semula sebesar Rp.999.310.000,00 menjadi sebesar Rp.241.804.271,00 mengalami penurunan sebesar Rp.757.505.729,00 atau 75,80% yang disebabkan penyesuaian

belanja operasi pada kegiatan desa mandiri pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan serta penyuluhan sumber pangan alternatif.

- 4) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanian, anggaran semula sebesar Rp.31.400.801.000,00 menjadi sebesar Rp.17.154.972.827,00 mengalami penurunan sebesar Rp.14.245.828.173,00 atau 45,37% akibat penundaan pengadaan tanah untuk akses nDalem Joyokusuman, pengadaan tanah di Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Kemlayan dan rasionalisasi belanja pemeliharaan rutin penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan pemeliharaan rutin aset tetap pemerintah daerah.
- 5) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup, anggaran semula sebesar Rp.68.978.550.578,00 menjadi sebesar Rp.57.706.280.052,00 mengalami penurunan sebesar Rp.11.272.270.525,00 atau 16,34% akibat penyesuaian atas belanja operasi dan belanja modal kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional angkutan sampah, Penundaan Pengadaan Alat Berat TPA Poteri Cempo, pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, namun demikian terdapat tambahan anggaran untuk belanja operasi persampahan di Dinas Lingkungan Hidup dan penyusunan UKL UPL untuk mendukung pembangunan stadion mini yang akan di kerjakan oleh Pemerintah Pusat di Kelurahan Nusukan.
- 6) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil, anggaran semula sebesar Rp.8.262.507.000,00 menjadi sebesar Rp.5.903.821.527,00 mengalami penurunan sebesar Rp.2.358.685.473,00 atau 28,55% disebabkan penyesuaian belanja operasi pada kegiatan SPM bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 7) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, anggaran semula sebesar Rp.15.425.748.094,00 menjadi sebesar Rp.10.738.486.509,50 mengalami penurunan sebesar Rp.4.687.261.584,50 atau

- 30,39% yang disebabkan penundaan kegiatan TMMD dan Karja Bakti Daerah serta rasionalisasi belanja operasional RT dan RW sebesar 50%, namun demikian terdapat alokasi tambahan untuk penanganan COVID-19 bidang ekonomi yang bersumber dari DAU Tambahan untuk penberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui skema swakelola Tipe IV.
- 8) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, anggaran semula sebesar Rp.10.976.724.000,00 menjadi sebesar Rp.5.680.770.167,00 mengalami penurunan sebesar Rp.5.295.953.833,00 atau 48,25% yang disebabkan penyesuaian belanja operasi pada kegiatan Pelayanan KIE dan Pelayanan perencanaan kontrasepsi KB serta penundaan hibah sepeda kepada kader KB.
- 9) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan, anggaran semula sebesar Rp.34.351.271.000,00 menjadi sebesar Rp.24.234.804.020,00 mengalami penurunan sebesar Rp.10.116.466.980,00 atau 29,45% akibat penyesuaian atas belanja operasi SPM Bidang Perhubungan, namun demikian terdapat tambahan anggaran untuk mendukung operasional BST hibah dari APBN, pembelian marka jalan dan penyesuaian halte BST, dukungan belanja operasi SPM Bidang Perhubungan serta penyesuaian Andalan untuk mendukung pembangunan stadion rami yang akan di kenakan oleh Pemerintah Pusat di Kelurahan Nusukan.
- 10) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, anggaran semula sebesar Rp.16.234.368.000,00 menjadi sebesar Rp.8.272.061.718,00 mengalami penurunan sebesar Rp.7.962.306.382,00 atau 50,34% yang disebabkan penyesuaian belanja operasi sewa VPN (pemanggunaan Terminal Mounting Unit : (TMU)) e-pajak dan pemeliharaan rutin portal web pemerintah Kota Surakarta.
- 11) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, anggaran semula

sebesar Rp.8.514.193.000,00 menjadi sebesar Rp.2.749.446.430,00 mengalami penurunan sebesar Rp.5.764.746.570,00 atau 67,71% yang disebabkan penyesuaian belanja operasi pada kegiatan Diklat bagi koperasi dan UMKM serta penundaan keikutsertaan dalam pameran UMKM. Namun demikian terdapat alokasi anggaran untuk penyusunan Kajian Strategis Pemberdayaan UMKM terdampak COVID-19

- 12) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal, anggaran semula sebesar Rp.3.176.920.516,00 menjadi sebesar Rp.3.523.922.956,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.347.002.440,00 atau 10,92% yang disebabkan penyesuaian belanja operasi pada kegiatan pameran investasi, namun demikian terdapat tambahan anggaran untuk operasional Mal Pelayanan Publik yang akan resmi beroperasi pada Bulan Agustus Tahun 2020.
- 13) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, anggaran semula sebesar Rp.64.941.388.000,00 menjadi sebesar Rp.39.802.629.727,00 mengalami penurunan sebesar Rp.25.138.758.273,00 atau 38,71% yang disebabkan penyesuaian atas belanja operasi operasional Kelas Khusus Olahraga (KKO) serta penyelenggaraan POPDA serta penundaan kegiatan lanjutan pembangunan Gedung Indoor Manahan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, dikarenakan terdapat kaji ulang anggaran atas semua alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Namun demikian, dalam rancangan KUPA-PPAS 2020, terdapat tambahan alokasi anggaran untuk persiapan venue dan dukungan sarana prasarana penyelenggaraan Piala Dunia U-21.
- 14) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik, dari anggaran semula sebesar Rp.1.327.000.000,00 menjadi sebesar Rp.464.547.943,00 mengalami penurunan sebesar

atas penyesuaian belanja operasi pada program Genar lkan.

mengalami penurunan sebesar Rp.230.053.720,00 atau 52,09%
sebesar Rp.441.680.000,00 menjadi sebesar Rp.211.626.280,00

1) Urusan Pilihan Keluaran dan Penarikan, dari anggaran semula

c. Urusan Pilihan

belanja operasi pada kegiatan bidang kearsipan.

Rp.1.041.576.180,00 atau 69,09% akibat penyesuaian atas

Rp.465.918.820,00 mengalami penurunan sebesar

anggaran semula sebesar Rp.1.507.495.018,00 menjadi sebesar

18) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan, dari

dan Rehab Saliutan Taman Cerdas Kerten.

Taman Cerdas di Kelurahan Gilingan, Penunpung, Joyobakan

balan pustaka perpustakaan serta penunlaan pembangunan

kampung, belanja operasi di taman cerdas dan penyesuaian

penyesuaian belanja operasi rutin perpustakaan kota dan

Rp.10.301.959.860,00 atau 69,51% yang disetahkan atas

mengalami penurunan sebesar

Rp.14.821.685.000,00 menjadi sebesar Rp.4.519.725.140,00

Perpustakaan, dari anggaran semula

17) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang

perumlaan pengadaan gamelan.

kebudayaan yang tertunda karena COVID-19 serta

penyesuaian atas belanja operasi pada kegiatan seni

Rp.21.666.051.204,00 atau 71,58% yang disetahkan

sebesar Rp.8.600.691.480,00 mengalami penurunan sebesar

dari anggaran semula sebesar Rp.30.266.742.684,00 menjadi

16) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan,

belanja operasi pada kegiatan bidang persandian.

Rp.9.775.000,00 atau 9,78% yang disetahkan penyesuaian

sebesar Rp.90.225.000,00 mengalami penurunan sebesar

dari anggaran semula sebesar Rp.100.000.000,00 menjadi

15) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian.

atas belanja operasi pada kegiatan bidang statistik.

Rp.862.452.057,00 atau 64,99% yang disetahkan penyesuaian

- 2) Urusan Pilihan Pariwisata, dari anggaran semula sebesar Rp.16.568.467.000,00 menjadi sebesar Rp.7.621.726.609,00 mengalami penurunan sebesar Rp.8.946.740.391,00 atau 54% atas penyesuaian atas belanja operasi yang menyebabkan penundaan pelaksanaan kalender event bidang pariwisata karena adanya Pandemi COVID-19 dan penundaan pameran pariwisata ke luar daerah, namun demikian terdapat alokasi anggaran DAK Fisik bidang pariwisata untuk pembangunan sarpras Taman Balekambang, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.
- 3) Urusan Pertanian, dari anggaran semula sebesar Rp.6.526.288.516,00 menjadi sebesar Rp.3.848.908.029,00 mengalami penurunan sebesar Rp.2.677.380.487,00 atau 41,02% akibat penyesuaian atas belanja operasi pada kegiatan bidang pertanian/ perkebunan masyarakat.
- 4) Urusan Pilihan Perdagangan, dari anggaran semula sebesar Rp.15.952.942.926,00 menjadi sebesar Rp.11.205.935.117,50 mengalami penurunan sebesar Rp.4.747.007.808,50 atau 29,76% akibat penyesuaian atas belanja operasi pada pemeliharaan pasar tradisional dan penataan bagi PKL serta penundaan keikutsertaan dalam pameran expo bidang perdagangan ke luar daerah.
- 5) Urusan Pilihan Perindustrian, dari anggaran semula sebesar Rp.9.338.708.000,00 menjadi sebesar Rp.660.811.735,00 mengalami penurunan sebesar Rp.8.677.896.265,00 atau 92,92% akibat penyesuaian atas belanja operasi kegiatan pameran produk IKM, fasilitasi dan pembinaan kemampuan teknologi industri.
- 6) Urusan Pilihan Transmigrasi, dari anggaran semula sebesar Rp.200.000.000,00 menjadi sebesar Rp.0,00 mengalami penurunan sebesar Rp.200.000.000,00 atau 100% yang disebabkan dengan penundaan perpindahan serta penempatan transmigran baru.

Sistem Penyediaan Air Minum WOSUSOKAS serta Rencana Umum Energi Daerah (RUE), *Feasibility Study* *Masterplan* Rencana Umum Tata Ruang (RUTRI), *Kreatif*, *Penyusunan Masterplan* Jalanan Jalan Kota, *Kerem* Rencana Induk Air Limbah, Pengusutan Kajian Ekonomi Dokumen Rencana Tataan Transportasi Lokal, *Review* pemindahan beberapa dokumen perencanaan antara lain Rp.14.785.117.815,00 atau 49,28% yang disebabkan sebesar Rp 15.216.461.785,00 mengalami penurunan sebesar anggaran semula sebesar Rp.30.001.579.600,00 menjadi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan, dari

lemuan pengawasan.

Pengawasan Daerah (ARWASDA) serta tindak lanjut hasil internal secara berkala, Pelaksanaan kegiatan Gelat penyusunan belanja operasi pada kegiatan pengawasan Rp.3.346.741.953,00 atau 45,05% yang disebabkan sebesar Rp.4.081.970.047,00 mengalami penurunan sebesar anggaran semula sebesar Rp.7.428.712.000,00 menjadi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan, dari

Pengawasan Negara.

pimpinan DPRD dan dukungan belanja operasi jasa penyusunan Raperda, pengadaan kendaraan dinas 2020 terdapat tambahan untuk Tiket bagi Pimpinan dan Namun demikian dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran Kelurahan Musikan dan Pendopo Kelurahan Kadipiro, pembangunan gedung berbagai Kelurahan Sumber, dan 54 Kelurahan dan pendanaan pembangunan daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 5 kecamatan 44,90%, akibat penyusunan belanja operasi pada perangkat mengalami penurunan sebesar Rp.40.241.590.636,50 atau Rp.89.626.836.760,00 menjadi sebesar Rp.49.385.246.123,50 Pemerintahan, dari anggaran semula sebesar

1) Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Pendataan *Septictank* Layanan Lumpur Tinja di Kecamatan Laweyan, Serengan dan Pasar Kliwon.

- 4) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan, dari anggaran semula sebesar Rp.52.680.340.069,00 menjadi sebesar Rp.29.772.319.688,55 mengalami penurunan sebesar Rp.22.908.020.380,45 atau 43,48% akibat penyesuaian belanja operasi pada kegiatan bidang keuangan daerah dan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan PAD.
- 5) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dari anggaran semula sebesar Rp.11.299.304.400,00 menjadi sebesar Rp.4.718.402.625,40 mengalami penurunan sebesar Rp.6.580.901.774,60 atau 58,24% akibat penyesuaian belanja operasi pada kegiatan bidang kepegawaian antara lain: penyesuaian *schedule* tahapan seleksi penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyesuaian belanja diklat teknis dan struktural dengan mempertimbangkan Pandemi COVID-19.
- 6) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan, dari anggaran semula sebesar Rp.1.200.000.000,00 menjadi sebesar Rp.433.206.645,00 mengalami penurunan sebesar Rp.766.793.355,00 atau 63,90%, yang disebabkan penyesuaian belanja operasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan daerah.

III. PERUBAHAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

a. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Struktur Pembiayaan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2020 terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan :

1. Penertimaan Penbiayaan Daerah
 - Sisa Lebih Pertimbangan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) masih menjadi sumber utama penerimaan pembiayaan. Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, SILPA sebesar menjadi sebesar Rp 105.310.864.321,01 dari asumsi awal sebesar Rp 100.000.000.000.000, SILPA tersebut merupakan pendapatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019.
 2. Pengeluaran Penbiayaan Daerah
 - Pengeluaran Penbiayaan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp,00 terdiri dari :
 - a. Pervertiaan modal (investasi) pemerintah daerah berkurang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dari anggaran awal sebesar Rp.10.126.000.000,00 menjadi sebesar Rp 7.626.000.000,00 karena adanya penundaan rencana investasi produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) kepada PDAM Kota Surakarta.
 - b. Pembayaran hutang pokok daerah sebesar Rp. 444.472.000,00, hutang pendanaan Pasar Singosaren (RDA 304/D73/1999), yang pada tahun 2020 merupakan tahun akhir pelunasan pinjaman dimaksud.
 - b. Penasalahan Utama Penbiayaan Daerah
 - i. Trend Sisa Lebih Pertimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang makin rasional dan perlu kehati-hatian dalam memasang asumsi, khususnya terhadap SILPA ril (non terkait atas dana earmark).
 - ii. Terhadap rencana penvertiaan modal kepada Perusahaan, pada prinsipnya harus menyediakan ketersediaan kajian investasi dan penciptaan Perda rencana investasi Perusahaan, setelah terlebih dahulu memastikan pemenuhan belanja wajib dan mengikat.

c. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang salah satunya dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan adanya selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Hal ini mendorong penganggaran belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan yang akan dicapai serta besarnya sumber pembiayaan yang dimiliki.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Arsip DPRD Kota Surakarta

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1.2 CAPAIAN INDIKATOR DAERAH

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan implementasi dan visi dan misi Walikota-Wakil Walikota yang telah dituangkan dalam RPJMD. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 - 2021, Visi Walikota-Wakil Walikota Surakarta terpilih Tahun 2016-2021 yang ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021, yaitu "Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera". Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan melalui misi, yang dikenal dengan 3WMP, yaitu "Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan Papan". Adapun realisasi daripada misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis daerah sebagai berikut :

A. MISI WARAS

1. **TUJUAN 1** : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, promosi dan preventif kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

No	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	77	77,16	77,11	77,12

Sasaran dari Tujuan 1 adalah sebagai berikut:

- i. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat jasmani dan rohani, dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020

No	Indikator	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Angka kematian ibu	52,28	41,83	41,08	41,52
2	Angka kematian bayi	2,82	2,30	1,93	1,14
3	Angka kematian balita	3,36	3,14	4,06	1,45
4	Angka kesakitan DBD	92,13	44,91	38,38	12,25
5	Angka kesakitan TB	126	120	48,07	179,2
6	Proporsi Kasus Penyakit Tidak Menular	29,50	20,00	23,67	28,30
7	Tingkat Deteksi dini Kesehatan Masyarakat (%)	100	100	85	100
8	Rasio rumah sakit	0,25	0,33	0,32	0,33

Indikator sebagai berikut:

ii. Meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan kesehatan dengan

1	Persentase rumah tangga berperilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS) (%)	53,17	75,00	64,02	70,26
2	Prevalensi HIV/AIDS pada populasi dewasa	0,015	0,010	0,03	0,0275
3	Persentase penanganan kasus gangguan jiwa berat (%)	100	100	44,71	52,9
4	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	1,95	1,85	0,89	1,21

2. **TUJUAN 2 :** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

No	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	40,71	41,54	52,67	52,80

Sasaran dari Tujuan 2 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dan perilaku pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) (%)	44,44	72,22	65,52	72,72

B. MISI WASIS

- a. **TUJUAN 1:** Terwujudnya Pendidikan untuk semua yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

No	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,36	10,75	10,54	10,35
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,14	15,15	14,53	15,37

Sasaran dari Tujuan 1 adalah sebagai berikut:

- i. Meningkatnya perluasan akses dan kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020

No	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Target 2020	2019	2020
				Realisasi	

- b. TUJUAN 2 : Terwujudnya masyarakat yang cakap mengupayakan pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya, serta prestasi pemuda dan olah raga, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	2019	2020
				Realisasi	
1	Cakupan layanan pendidikan non formal (%)	2,18	3,52	3,20	3,20
2	Cakupan serapan tenaga kerja terampil (%)	68,75	79,90	67,50	50

- berdaya saing dengan indikator sebagai berikut:
- ii. Terwujudnya masyarakat dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan

1	APK : PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B	52,76 108,25 96,93	75,46 105,00 105,00	86,50 107,81 89,03	86,50 103,86 98,91
2	APM : SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B	97,39 86,20	99,56 97,70	99,18 80,60	93,02 74,82
3	Angka Kelulusan (AL) : SD/MI, SMP/MTs	100 100	100 100	100 100	100 99,94
4	Jumlah prestasi pendidikan (siswa, guru, sekolah) tingkat regional/nasional/internasional (buah)	30	55	131	56
5	Jumlah pengunjung perpustakaan / Taman Cerdas (orang)	450.020	860.021	783.506	107.346

1	Tingkat aktualisasi pelestarian seni budaya (%)	78,57	100	93,95	54,5
2	Tingkat prestas. pemuda dan olah raga (%)	55,49	61,04	75,01	58,46

Sasaran dari Tujuan 2 adalah sebagai berikut:

- i. Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Kondisi	Target	Realisasi	
		2015	2020	2019	2020
1	Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk	6,80	7,05	6,20	6,75
2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	34	15	15	2

- ii. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Kondisi	Target	Realisasi	
		2015	2020	2019	2020
1	Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/ nasional/ internasional (%)	80,98	82,09	83,61	32,58
2	Persentase pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional/ nasional/ internasional (%)	30	40	66,41	78

C. MISI WAREG

- a. **TUJUAN 1 :** Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohani, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

No	Indikator	Kondisi	Tarjet	Realisasi
1	Produk padi (ton)	1.378	1.415	1.073
2	Produk hasil peternakan (ton)	3.834	4.242	6.320
3	Produk budidaya ikan (ton)	36,23	45	12
				9.116,736
				1.206,858
				2020

sebagai berikut:

ii. Terjadanya ketersediaan pangan yang terjangkau dengan indikator

No	Indikator	Kondisi	Tarjet	Realisasi
1	Persentase Penguasaan PMS (%)	13	8,54	24,71
				26,31
				2020

i. Menuutnya PMS, dengan indikator sebagai berikut:

Sasaran dari Ejuan 1 adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Kondisi	Tarjet 2020	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,79	87,12	96,82
2	Tingkat Kunyukuan (%)	10,30	9,48	8,70
3	Indeks Cini	0,351	0,3277	0,360
4	IPV (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	5,95	3,56	4,18
5	Pendapatan per kapita (rupiah)	55.614.295,67	65.771.495,30	68.314.065,00
6	Pengeluaran per kapita (rupiah)	13.601.000	15.770.000	14.328.000
				15.049.000
				0
				67.291.503,0
				0
				7,92

4	Persentase Ketersediaan pangan utama yang terjangkau (%)	161,51	161,76	225,78	369,40
5	Tingkat Terlindunginya Konsumen (%)	69,77	82,95	80,46	80,50

iii. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kowilayahan

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Persentase jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	10	15	15	15
2	Persentase transmigran yang diberangkatkan (%)	14,29	24,44	80	0
3	Persentase klaster Industri yang berkembang (%)	64,29	92,86	85,71	0

iv. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,69	53,74	50,64	50,64
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100

berikut

ii. Meningkatnya jumlah investasi dengan indikator sasaran sebagai

No	Indikator	Kondisi	Target	Realisasi
1	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	11,06	7	3,97
	Sasaran	2015	2020	2020
				-14,7

sebagai berikut

i. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran

Sasaran dari Tujuan 2 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Tujuan	Kondisi	Target	Realisasi
1	Pertumbuhan ekonomi/ PDRB (%)	5 ± 1	5,77-6,17	3,78
2	Tingkat inflasi (%)	2 ± 1	2,49-1,1	2,94
				1,38
				-1,74
				2020

dengan indikator tujuan sebagai berikut:

b. TUJUAN 2 : Terwujudnya perekonomian kota yang maju, kuat dan mandiri.

No	Indikator	Kondisi	Target	Realisasi
1	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	72,10	83,32	90,28
2	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM yang dibina (%)	0	2,01	3,52
3	Persentase wirausaha baru (%)	0	7	25
				4,95
				74,18
	Sasaran	2015	2020	2019
				2020

v. Meningkatnya kesempatan kerja

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Persentase Rata-rata Pertumbuhan Investasi (%)	19,30	6,65	-37,80	47,83

- iii. Berkembangnya ekonomi kreatif dan kota tujuan wisata semi dan budaya dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	4.142.785	5.500.000	5.353.834	658.776
2	Persentase Penerapan inovasi (%)	0	25	33,33	55,88

D. MISI MAPAN

- a. **TUJUAN 1** : Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis *E-Government* , dengan indikator tujuan sebagai berikut:

No	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat	62,51	78	83,06	83,88

Sasaran dari Tujuan 1 adalah sebagai berikut:

- i. Meningkatkan pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi (*Solo Smart City*), dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Persentase PD yang melaksanakan integrasi aplikasi <i>E-governance</i> (%)	0	85,37	85,37	85,37
2	Persentase PD yang	30,53	100	100	100

No	Indikator	Kondisi	Target	Realisasi	
		2015	2020	2019	2020
1	Matras SIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Kota Sukakarta	2,48 (level berkembang)	3,10	3,125	3,125
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase pelayanan yang memenuhi standar ISO 9001:2008 (%)	43	73,20	100	98

Indikator sebagai berikut

- ii. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan

No	Indikator	Kondisi	Target	Realisasi	
		2015	2020	2019	2020
3	Persentase Ketersediaan SOP persandian (%)	0	0	100	100
4	Persentase informasi keluaran aktivitas DPRD yang dipublikasikan berbasis teknologi informasi sesuai SOP yang berlaku (%)	82,37	93,02	97,36	100

4	Persentase penurunan pelanggaran disiplin operator (%)	0,087	0,033	0,12	0,066
5	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (%)	91,28	91,28	97,08	102,44
6	Persentase aset yang bersertifikat (%)	81,93	92,69	97,54	97,75

- b. **TUJUAN 2** : Meningkatnya kinerja pembangunan daerah berwawasan kependudukan dan keberlanjutan lingkungan dengan indikator tujuan sebagai berikut:

No	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan (%) : RPJMD RKPD	80 63	80 75	104,71 104,59	145,97 115,10

Sasaran dari Tujuan 2 adalah sebagai berikut:

- i. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Persentase ketepatan data perencanaan sesuai Standar Kebutuhan Layanan Data (%)	61,76	80	65,71	100

No	Indikator Sasaran	Kondisi	Target	Realisasi	
				2019	2020
1	persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan	40	100	95	65

berikut:

- i. Menurunnya konflik antargolongan dengan indikator sasaran sebagai Sasaran dan Tujuan 3 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Tujuan	Kondisi	Target	Realisasi	
				2019	2020
1	Persentase penyelesaian (keterlibatan, ketertarikan, keikutsertaan, keikutsertaan K3)	79,33	96	100	100

berikut:

- c. **TUJUAN 3 : Meningkatkan ketertarikan, keikutsertaan, keikutsertaan K3 dan hak asasi manusia serta harmoni sosial masyarakat dengan indikator tujuan sebagai**

No	Indikator Sasaran	Kondisi	Target	Realisasi	
				2019	2020
1	Cakupan Peserta KB AKBF (%)	66,83	69,30	68,21	71,69
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,9	0,6	0,5	0,97

- ii. Turunnya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Kondisi	Target	Realisasi	
				2019	2020
2	Hasil AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) bernilai Baik : Nilai LPPD dan EKPPD Hasil Evaluasi LKIP	3,0 (1)	3,35 (ST) 90 (AA)	3,27	NA

	wawasan kebangsaan			
--	-----------------------	--	--	--

- ii. Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda (%)	76,19	87,62	94,87	92

E. MISI PAPAN

- a. **TUJUAN 1 :** Tersedianya permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan siaga bencana, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

No	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Persentase luas Kawasan Kumuh (%)	8,16	0	2,82	2,82
2	Infrastruktur Kota dalam kondisi baik (%)	76,05	85,61	83,67	83,67

Sasaran dan Tujuan 1 adalah sebagai berikut:

- i. Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni dan berkurangnya pemukiman kumuh dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Persentase Penurunan RTLH (%)	100	75,79	89,11	60,75
2	Persentase Lingkungan yang sehat dan aman yang	91,24	100	98,63	97,29

sebagai berikut:

iii. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dengan indikator

No	Indikator	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Persentase panjang jalan panjang jaringan persampahan dalam kondisi baik (%)	73,37	87,05	84,34	85,66
2	Persentase panjang jaringan persampahan dalam kondisi baik (%)	85	90	89,47	89,47
3	Persentase panjang jalan persampahan dalam kondisi baik (%)	69,77	79,77	77,19	81,13
4	Persentase operasional BSI yang terlayani	14,29	0	73,33	80

dengan indikator sebagai berikut:

ii. Meningkatkan kualitas sarana prasarana persampahan yang berkualitas

No	Indikator	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020
3	Persentase Rumah Tangga persampahan air bersih (%)	80,99	100	84,99	94,56
4	Persentase Rumah Tangga persampahan (%)	97,10	100	86,51	86,54
	didukung PSU (%)				

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
I	Persentase penanganan sampah (%)	95,90	97,25	88,88	85,29

- iv. Meningkatnya kesiapsiagaan sistem antisipasi risiko kebencanaan dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
I	Persentase kelurahan tangguh bencana (%)	0	3,92	100	100

- v. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Persentase penambahan luasan ruang publik yang dimanfaatkan (%)	22,03	28,61	0,35	0,47
2	Rasio ruang Terbuka Hijau Publik	9,72	9,94	8,47	10,42

- b. **TUJUAN 2** : Meningkatnya sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan dengan indikator tujuan sebagai berikut:

No	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Target 2020	Realisasi	
				2019	2020
1	Persentase Sarana dan Prasarana (%):				
	1. kegiatan sosial dan budaya yang representatif	70,33	83,47	110,49	68,83
	2. kegiatan ekonomi yang representatif	33,82	49,50	45	49,5

Sasaran dan Tujuan 2 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang budaya yang saling dengan

indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator	Kondisi	TARGET	Realisasi	
1	Persentase Pasar Rakyat yang memenuhi persyaratan (%)	63,64	72,73	73	75
2	Persentase Prasarana Ekonomi di dalam kluster ekonomi (%)	4,00	20	20	24

II. Tersedianya sarana prasarana sosial budaya dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator	Kondisi	TARGET	Realisasi	
1	Persentase prasarana sosial budaya yang representatif (%) :	41,86	56,40	54,57	54,83
2	Persentase Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang dilestarikan Budaya yang Kawasan Cagar Situs dan	94,12	100	100	66,66
3	Persentase tempat ibadah yang dibina	43	85	84,91	85

3.1.2 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Berikut adalah rangkuman hasil penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah:

Arsip DPRD Kota Surakarta

1. URUSAN : PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

a. BIDANG : PENDIDIKAN

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Pendidikan, SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMP Negeri 4, SMP Negeri 5, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, SMP Negeri 8, SMP Negeri 9, SMP Negeri 10, SMP Negeri 11, SMP Negeri 12, SMP Negeri 13, SMP Negeri 14, SMP Negeri 15, SMP Negeri 16, SMP Negeri 17, SMP Negeri 18, SMP Negeri 19, SMP Negeri 20, SMP Negeri 21, SMP Negeri 22, SMP Negeri 23, SMP Negeri 24, SMP Negeri 25, SMP Negeri 26, SMP Negeri 27, Sanggar Kegiatan Belajar, Bagian Keselamatan Rakyat

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	125%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa perawatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 7. Penyediaan kumpulan informasi listrik / perantara, tanggapan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan	100%	125%	

				konsultasi ke luar daerah 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak				
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	100%	100%		
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	125%		1. Pembangunan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pengadaan mebel	100%	125%		
4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	133%		1. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	133%		
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	57%		1. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 2. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 3. Pengembangan Sarana Prasarana PAUD 4. Operasional PAUD Formal 5. Operasional PAUD Non Formal 6. Operasional penyelenggaraan PAUD Formal (DAK Non Fisik)	43%	68%	1. Tidak ada anggaran/ bantuan dana/ beasiswa guru PAUD untuk menempuh pendidikan D4/S1 2. Tidak adanya proses akreditasi BAN-PAUD dan PNJ (monev) 3. Adanya pemangkas anggaran pada kegiatan peningkatan kompetensi guru PAUD sehingga kegiatan tidak	

					4. terselektora Diklat PAUD Pasir dan keranjang serta diklat kompetensi guru dan kepala PAUD serta insentif pembatik PAUD tidak terlaksana karena refocusing anggaran untuk pandemi COVID-19	
6	Program Pendidikan Non Jormal	64%	1. Pemberian bantuan operasional pendidikan non jormal 2. Pembikasan sosialisasi pendidikan non jormal 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan 4. Pengembangan Pendidikan Non Jormal 5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non jormal (DAK) 6. Pemberian bantuan operasional 7. pendidikan non jormal (DAK Non Jarak) 8. Pemberdayaan tenaga pendidik non jormal	93%	70%	1. Tidak adanya proses akreditasi BAN-PAUD dan PNP (monevium) 2. Adanya pemangkasan dana pada kegiatan sertifikasi dan akreditasi satuan PNP karena refocusing anggaran untuk pandemian COVID-19 3. Adanya kebijakan penatikan Ljian Nasional di masa pandemi Covid 19, sehingga hanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang berjalan
7	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	49%	1. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 2. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 3. Pengembangan sistem	100%	49%	1. Keterbatasan kuota BAN-S/MI dan anggaran Program Kendatikan Trekesi Guru pada APBD TA 2020 2. Sesuai dengan Permendikbud No. 15 tahun 2018 tentang Penentuan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas

				penghargaan dan pertundungan terhadap profesi pendidik 4. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan			Sekolah, Kepala Sekolah tidak memiliki tugas untuk mengajar
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	94 %		1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2. Pembinaan Siswa Baru 3. Pembangunan gedung sekolah SD 4. Pembangunan gedung sekolah SMP 5. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP 6. Pengadaan mebelier sekolah SD 7. Pengadaan mebelier sekolah SMP 8. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD 9. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 10. Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD 11. Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP 12. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD 13. Pembinaan kelembagaan dan	90 %	95 %	

			manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SMP 14. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD 15. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP 16. Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL) SD 17. Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL) SMP 18. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SD 20. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SMP 21. Rehabilitasi sodang/beral bangunan sekolah SD (DAK) 22. Pembangunan gedung sekolah SD (DID) 23. Pembangunan gedung sekolah SMP (DID) 24. Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP/MTs/SMPLB 25. Monitoring, evaluasi dan pelaporan SMP/MTs/SMPLB 26. Penggunaan teknologi		

			40. bangunan sekolah rehabilitasi sedang/berat mang ikailah 41. Penyelidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/SMK 42. Pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 43. Penyelidikan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SMI B dan SMP/MTs 44. Pemeliharaan rutin/botakan ruang kelas sekolah 45. Pengembangan perpustakaan SMP/MTs/SMPPLD 46. Penyelidikan rutin/berkala taan, lapangan upacara, dan fasilitas parkir			
--	--	--	---	--	--	--

b. BIDANG : KESEHATAN

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Kesehatan, Puskesmas Gajahman, Puskesmas Gambirsari, Puskesmas Gilimpon, Puskesmas Jayenggan, Puskesmas Klatonon, Puskesmas Manahan, Puskesmas Ngorosan, Puskesmas Nusukan, Puskesmas Papang, Puskesmas Penumpang, Puskesmas Puranyawit, Puskesmas Purwodiningratan, Puskesmas Purosari, Puskesmas Sangkrak, Puskesmas Setabelan, Puskesmas Sibela, Puskesmas Banyuwang, Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karo, Instalasi Farmasi, Laboratorium Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Ngipang, Bagian Kesejahteraan Rakyat, 54 Kelurahan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang tetakan dan pengandaian 8. Penyediaan komponen instalasi listrik / pemertanian bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa Tenaga Kontrak 13. Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	100%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional 3. Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 4. Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan Rutin/ berkala mebeleur 6. Pengadaan Mebeleur	100%	100%	

			7. Pemeliharaan Rutin/ berkala meliputi a. Pembangunan Gedung Kantor			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Penyusunan Pelaporan Keuangan Sektoral	100%	100%	
4	Program Peningkatan Pelaporan BLUD	100%	Pelaporan BLUD	100%	100%	
5	Program Obat dan Pembelian Kesehatan	100%	1. Pengadaan obat dan pembelian kesehatan 2. Program Pengalihan Obat dan perbaikan kesehatan (DOAK) 3. Peningkatan pemerataan obat dan perbaikan kesehatan (DOAK)	100%	100%	
6	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jawa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata	78%	1. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 2. Pengadaan meubelair rumah sakit 3. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 4. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 5. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DBHCHT) 6. Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengadaan limbah rumah sakit 7. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit 8. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DOAK)	99%	79%	

7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	80%	1. Penyemproman/Fogging Sarang Nyamuk 2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 4. Pemantauan Imunitas 5. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 6. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Ido) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 7. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (DAK) 8. Peningkatan Imunitasi	99%	86%	
8	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	102%	1. Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas (DAK) 2. Peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas (DID Tambahan)	100%	102%	
9	Program Pengawasan Obat dan Makanan	101%	1. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya (DAK) 3. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	99%	100%	
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	88%	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	98%	90%	
11	Program peningkatan	98%	1. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil	100%	98%	

	Keselamatan Ibu melahirkan dan anak		1. Jarak Keluarga Kecil Mampu 2. Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil (DAK Non Fisik) 3. Pembiayaan kesehatan anak remaja			
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	90%	Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita	90%	101%	
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	72%	Belayanan Pemeliharaan Kesehatan	96%	75%	Kegiatan pustuasia belum berjalan sesuai jadwal terkait kondisi pandemi
14	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	125%	1. Peningkatan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya 2. Peningkatan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya (IDAK Pemugasan) 3. Pemberian tambahan makanan dan Vitamin 4. Pemberian makanan tambahan bagi Balita gizi Kurang 5. Pemberian makanan tambahan bagi Anak Sekolah 6. Pemberian makanan tambahan bagi Ibu Hamil KEK	94%	133%	
15	Program Promosi Kesehatan dan	195%	1. Peningkatan Media promosi dan Informasi Sealer I Bulup Sehat	99%	196%	

	Terlindung Masyarakat		2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3. Kegiatan peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan		
16	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	113%	1. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 2. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 4. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 5. Penyusunan Standar pelayanan kesehatan	100%	113%
17	Program upaya kesehatan Masyarakat	46%	1. Pemeliharaan dan pemutihan kesehatan 2. Revitalisasi sistem kesehatan 3. Peningkatan pelayanan dan penganggaran masalah kesehatan 4. Peningkatan kesehatan masyarakat (BKK) (DAK Non Fisik) 5. Dukungan manajemen bantuan operasional kesehatan (BKK) dan jaminan persalinan (Jampersal) (DAK Non Fisik) 6. Pemeliharaan dan pemutihan kesehatan (DID Tambahan) 7. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 8. Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	94%	163%

c. BIDANG : PEKERJAAN UMUM

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, BAPPELDA, Dinas Perdagangan, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Kerten, Kelurahan Karangasem, Kelurahan Pajang, Kelurahan Laweyan, Kelurahan Buntu, Kelurahan Panuliran, Kelurahan Sriwedati, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Sondakan, Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Lanukusuman, Kelurahan Serengan, Kelurahan Jipen, Kelurahan Kratonan, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Mlojo, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Sangkrab, Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Jethes, Kelurahan Gajahen, Kelurahan Baluwati, Kelurahan Kampungbaru, Kelurahan Keduglumbu, Kelurahan Tegallatjo, Kelurahan Jethes, Kelurahan Sudhoperjan, Kelurahan Pucungsuwit, Kelurahan Jagaku, Kelurahan Purwodiningrat, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Banyuanyan, Kelurahan Jogo, Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Timuran, Kelurahan Kepalpon, Kelurahan Setabelan, Kelurahan Mangkubumen, Kelurahan Manahan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	KATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	KATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESUKSESAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan ruang bekerja dan	100%	100%	

			penggunaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perlengkapan Perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak			
2	Program Peningkatan Penguasaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Mebelkur 3. Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 5. Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 6. Pemeliharaan Rutin/ berkala mebelkur	100%	100%	
4	Program Pemanfaatan Ruang	100%	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	100%	100%	
5	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	100%	1. Rehabilitasi Pemeliharaan Pasar pedesaan 2. Pembangunan Pasar pedesaan	100%	100%	

			3. (DPAK) Pembangunan jalan dan jembatan Perdesaan			
6	Program Pembangunan jalan dan jembatan	99%	1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan jembatan 3. Pembangunan jalan (DPAK) 4. Pembangunan jalan (Rantuan Keuangan Triptisni) 5. Pembangunan jalan (Hibah Partwisari) 6. Pembangunan jalan (DAU Taubahan Dana Kelurahan)	135%	74%	Adanya pengurangan dana (Rasionalisasi) pada paket pekerjaan di Tahun Anggaran 2020
7	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	154%	1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2. Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4. Kudug Wulit saluran drainase/gorong-gorong (DAU Tambahan Dana Kelurahan) 4. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (DAU Tambahan Dana Kelurahan)	100%	154%	
8	Program Pembangunan tutup/lalud/bronjong	300%	Pembangunan tutup/lalud/bronjong	156%	64%	Refocusing anggaran
9	Program pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah	100%	Penyediaan Prasarana dan Sarana Voc Leubah (DAL Tambahan Dana Kelurahan)	100%	200%	
10	Program Pengembangan wilayah strategis dan	98%	1. Pembangunan/peningkatan infrastruktur 2. Motivasi warga masyarakat dan	358%	28%	

	Cepat Tumbuh		pelaporan		
11	Program Pengendalian Banjir	98%	1. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 2. Peningkatan Pembersihan dan penguatan sungai/kali	100%	98%
12	Program Pengendalian Pemukiman Ruang	88%	1. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Penguasaan pemanfaatan ruang 3. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota 4. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 5. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 6. Koordinasi Teknis Perijinan	100%	88%
13	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinatangan	78%	Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat	100%	78%
14	Program Perencanaan Tata Ruang	83%	1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 2. Survey dan Penelitian	83%	99%
15	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	214%	1. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 2. Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan 3. Rehabilitasi/ pemeliharaan pemertangan jalan	128%	147%
					Adanya efisiensi anggaran yang dapat melebihi target kinerja pekerjaan fisik.

d. BIDANG : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Pemukiman, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, UPT Rumah Sewa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, Kelurahan Mojo, Kelurahan Sudioprajan, Kelurahan Purwodinugrahan, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Timuran, Kelurahan Pungyawon, Kelurahan Gilingan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa perantara dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman	100%	100 %	

			11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa Tenaga Kerja			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala mobil/lori	100%	100%	
3.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	107%	1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 2. Pemataan sarana dan prasarana lingkungan perumahan 3. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK) 4. Pemataan sarana dan prasarana lingkungan perumahan (DAK Tambahan Dana Kelurahan) 5. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	100%	107%	

			(DPA: Tumbuhan Ujana Keluhahan)			
4.	Program Pengelohan Areal Pemukiman	100%	1. Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman 2. Peneliharaan sarana dan prasarana pemukiman	100%	100%	
5.	Program Pengembangan Perumahan	291%	1. Pembiayaan kubiakan, strategi, dan program perumahan 2. Penetapan norma standar pedoman dan manual (NSPM) 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perumahan 4. Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 5. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	100%	291%	Peningkatan Kualitas RUMAH DUDUK dari berbagai sumber dana : APBD, DAK, CSR dan BSPS
6.	Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 2. Sosialisasi norma standar prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	100%	100%	

			3. Pengawasan kebijakan kebakaran 4. Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran 5. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 6. Kegiatan penggalan dan pengumpulan biaya kebakaran			
--	--	--	---	--	--	--

e. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Perangkat Daerah Pelaksana: Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perdagangan, Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum, 5 Kecamatan dan 54 Kelurahan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan	100%	100%	

			- perengkapan kantor 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan pengemasan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik / pemangku bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan bahan, bahan dan peralatan pendukung 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. Penyediaan jasa Tunjangan Kontrak			
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Penyediaan mebeluri 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluri	100%	100%	

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	53%	Pendidikan dan Pelatihan Formal	53%	100%	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100%	100%	
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	6. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7. Pengadaan pakaian kerja lapangan	100%	100%	
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	99%	1. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Pengendalian kebisingan dan gangguan dan kegiatan masyarakat 3. Pengendalian keamanan lingkungan	103%	96%	
7	Program pemeliharaan kemitraan dan pencegahan tindak kriminal	0%	1. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan 2. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan sistemswakarsa di daerah 3. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan	0%	0%	Refecussing anggaran

			dalam teknik pencegahan kejahatan			
8.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertahan dan keamanan	98%	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	108%	90%	
9.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	98%	1. Penyuluhan pencegahan penularan/ penggunaan minuman keras dan narkoba 2. Penyelesaian barang kena cukai ilegal	99%	98%	
10.	Program pengendalian pengawasan ketahanan	85%	1. Peningkatan toleransi dan kerukunan ulian kehidupan beragama 2. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat 3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	89%	95%	
11.	Program pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan	100%	Facilitasi pencapaian halqah dan keberyaaan tujuan keberyaaan lainnya dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan	100%	100%	
12.	Program pendidikan politik masyarakat	100%	1. Penyuluhan kepada masyarakat	100%	100%	

			2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 3. Penyelenggaraan kegiatan desk Pilkada			
13	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100%	1. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 2. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	100%		
14	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	37%	1. Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam 2. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/kebahayakan bencana alam 3. Pengalihan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	56%	67%	1. Pembatasan kegiatan pengumpulan massa sehingga menyebabkan kegiatan sosialisasi tidak berjalan pada kegiatan pemantauan dan penyelenggaraan informasi potensi bencana alam 2. Subang sarana prasarana operasional penunjang penanggulangan bencana tidak dilaksanakan 3. Terkendala kebijakan pengadaan obat-obatan yang merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan dan Bantuan Sosial yang merupakan kewenangan dari Dinas Sosial

f. BIDANG : SOSIAL

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat, 5 Kecamatan dan 51 Kelurahan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang-barang dan perlengkapan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan peralatan rumah tangga 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Keperawatan kesehatan dan konsultasi ke luar daerah 11. Penyediaan jasa keamanan kantor 12. Penyediaan jasa tenaga kontrak	100%	97%	

2.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan kemajuan	91%	3. Penyusunan Operasional (SOP) 2. Penyusunan keuangan semesteran	Standar Prosedur	0%	N/A	Ketepatan anggaran, meskipun demikian aktivitas pelaporan di subbag keuangan tetap berjalan sesuai arahan yang berlaku
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91%	1. Pengadaan mebel 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebel		100%	91%	
4.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	204%	1. Meningkatkan Kemampuan (Capacity Building) pengas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 3. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 4. Verifikasi dan Validasi		92%	222%	Ungkat ketepatan yang tinggi disebabkan sasaran yang dipakai pada saat pelaksanaan antara 2016-2021 berbeda dengan revisi kriteria pada Tahun 2017 dimana kumpulan untuk sasaran Bantuan Pangan Non Tunai diakomodir mulai tahun tersebut; Data PMKS yang belum terupdate sejak Tahun 2014, namun telah diupdate pada Tahun 2019; dan jumlah penangan PMKS yg meningkat, penanganan PMKS diakomodir dalam 6 (enam) program

			1. Data Kritisitas 5. Pendampingan penyusunan program bantuan sosial berbasis keluarga 6. Verifikasi dan Validasi Data Kritisitas (DAK) 7. Fasilitasi manajemen usaha bagi betuaya miskin (PID Timintah)			
5.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi [Kesejahteraan Sosial]	204%	1. Koordinasi perumusan kebijakan dan sekonesasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 2. Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia. 3. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 4. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana 5. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan	100%	204%	Sesuai yang dipakai pada saat pembuatan restra 2010-2021 berbedanya dengan restra restra pada tahun 2017 dimana keamporan untuk sasaran Bantuan Pangan Non Tunai diakumulir mulai tahun 150. Data PMKS yang belum terupdate sejak tahun 2014, namun telah diupdate pada tahun 2019 untuk penanganan PMKS yg meningkat

8.	Program pembinaan panti asuhan/panti pietyo	100%	Cyerasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jempu	87%	121%	
9.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSX, naraka dan penyakit sosial lainnya)	308%	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	0%	N/A	1. Sasaran yang dipakai pada saat pembuatan revisi 2016-2021 berbeda dengan revisi revisi pada tahun 2017 dimana kumparan untuk sasaran Bantuan Pangan Non Tunai di komodor mulai tahun 1st Data tahun 2014, namun telah diupdate pada tahun 2015 jumlah penerangan PMKS yg meningkat. 2. Refocusing anggaran
10.	Program Pemberdayaan Kebutuhan Sosial	100%	1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 2. Pengembangan model perlindungan sosial	100%	100%	

2. URUSAN: PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

a. BIDANG : TENAGA KERJA

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Solo Technopark

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
----	--------------	--	---------------	---	---------------------------------------	------------

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bakar dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa Keamanan Kantor 13. Penyediaan jasa Tenaga Kontrak	100%	100%
2	Program peningkatan penguahan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%

3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pengadaan mebelur 2. Pemeliharaan rohn/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan tatanan/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebelur 6. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	100%	500%	
4.	Program Peningkatan Kemampuan Kerja	100%	1. Penyediaan informasi bursa tenaga kerja 2. Pengembangan keterampilan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	100%	100%	
5.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	16%	Pendidikan dan Pelatihan Kemandirian Bagi Tenaga Kerja	16%	98%	
6.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	25%	1. Fasilitas penyelenggaraan prosedur, penyelesaian hubungan industrial 2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan 3. Penyusunan Upah Minimum Kota (UMK)	100%	25%	Keforussing anggaran

b. BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta, 5 Kecamatan dan 54 Kelurahan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	KATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komposisi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	98%	102%	

			12. Penyelenggaraan Jasa Tenaga Kerja Honoror/TITL 13. Penyelenggaraan Jasa Tenaga Kontrak		
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	
3.	Program koreksinya kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	100%	1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Terumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	100%	100%
4	Program Penguatan Keterampilan Pengarusutamaan Gender dan Anak	77%	1. Penguatan keterampilan pengarusutamaan gender dan anak 2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kementerian pemberdayaan perempuan dan anak 3. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 4. Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 5. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang	96%	80%

			berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak			
5.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100%	1. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. 2. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 3. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT 4. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan 5. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	98%	102%	
6.	Program Peningkatan peran serta dan kesadaran gender dalam pembangunan	100%	1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 3. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesadaran gender	100%	100%	

c. BIDANG : PANGAN

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bagian Perencanaan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT	TINGKAT	KETERANGAN
----	--------------	-------------------	---------------	-------------------	---------	------------

	KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM		KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	147%	1. Analisis dan penyusunan peta kawasan dan supply pangan 2. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 3. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 4. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 5. Pengembangan cadangan pangan daerah 6. Pengukatan mutu dan keamanan pangan 7. Penyulhan sumber pangan alternatif 8. Pengembangan Model Distribusi Pangan yang efisien	100%	147%	

D. BIDANG : PERTANAHAN

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Pemerintahan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	122%	1. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2. Penyuluhan hukum pertanian	96%	127%	
2.	Program pengembangan sistem informasi pertanian	101%	Penyusunan Sistem Informasi pertanian yang terpadu	40%	N/A	Relocussing anggaran

a. BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, 5 Kecamatan dan 54 Kelurahan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	100%	

			5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung-undangan 10. Penyediaan angkutan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa Tenaga Kerja Ilmiah/THL 13. Penyediaan jasa Tenaga Keolah			
2	Program Peningkatan disiplin aparat	100%	Berwujudan paklaku kerja lapangan	100%	100%	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Kenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Penyediaan kendaraan dinas/operasional 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	100%	

			4. Pemeliharaan rutin/berkala mencakup,			
5.	Program Pengelolan ruang terbuka hijau (RTH)	114%	1. Pemetaan RTH 2. Pemeliharaan RTH 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	100%	114%	
6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	94%	1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 3. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 4. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan (DAU Tambahan Dana Kelurahan) 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 6. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAU Tambahan Dana Kelurahan) 7. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 8. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan	100%	93%	

7.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	74%	1. Penguasaan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 2. Pemantauan Kualitas lingkungan 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 4. Pemantauan Kualitas lingkungan 5. Penguasaan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	138%	55%	Rekrusling anggaran
8.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	103%	1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	100%	100%	
9.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	100%	1. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	125%	80%	
10.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	87%	1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 2. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	100%	87%	
11.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Salangan Sumber daya Alam	0%	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	N/A	Rekrusling anggaran

f. BIDANG : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Serengan, Kelurahan Tegallharjo

Tingkat Keersuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUALAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ pemertangan bangunan kantor	100%	100%	

			9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. Penyelenggaraan Lemaga Kontrak			
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Peneliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Peneliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4. Peneliharaan rutin/berkala mobil/cor	100%	100%	
4	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	100%	1. Sosialisasi kebijakan kependudukan 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	71%	Capaian pada beberapa indikator kegiatan melampaui target karena adanya peningkatan kinerja dan pelaksanaan Pilkada

			3. Pembangunan dan pengoperasian SLAK secara terpadu 4 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 6. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			
--	--	--	---	--	--	--

B. BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAJAT DAN DESA

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Pemerintahan, 5 Kecamatan dan 54 Kelurahan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	100%	Penelitian kegiatan lembaga kemasyarakatan (DAAU Tambahan Dana Kelurahan)	100%	100%	

2	Program Peningkatan Keterbukaan Masyarakat pedesaan	100%	1. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 2. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat pedesaan	100%		
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2. Pelaksanaan Karya Bhakti Daerah 3. TNI Manunggal Membangun Desa/TMMB (Bantuan Keuangan Propinsi) 4. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	100%	100%	

h. BIDANG : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bagian Kesejahteraan Rakyat, 54 Kelurahan
Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pelayan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyediaan jasa surat menerima 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan ATK 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan kumpulan instalasi 9. Penyediaan jasa tenaga Kontrak 10. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatatur	100%	1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2. Pemeliharaan makin/terkawat gedung kantor	100%	100%	

			1. Pemeliharaan rutut/berkala kendaraan dinas 4. Pengadaan Mobilpelur 5. Pemeliharaan rutin/berkala mobilpelur			
3	Program Keluarga Berencana	105%	1. Pemonev Pelayanan Keluarga Berencana 2. Pemeliharaan Keluarga Berencana 3. Pelayanan KIE (DAK) 4. Operasional Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik) 5. Dukungan Operasional Kampung KB (DAK Non Fisik) 6. Pelayanan KIE (DAK Non Fisik) 7. Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik) 8. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	97 %	108 %	
4	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	111%	1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KIR) 2. Memberikan dukungan dan partisipasi masyarakat yang berpengaruh sosialisme tentang KB	88%	127%	
5	Program Pelayanan Kontrasepsi	113%	1. Pelayanan Pemantauan Kontrasepsi KB 2. Pengadaan alat kontrasepsi	71%	159%	Adanya peningkatan kesetiaan ber-KH yang non-MK/P (kondom, suntik dan

			3. Distribusi Alat Kontrasepsi (DAK Nua Fusi)			tradisional) menjadi kesertaan bet-KB MKIP
6	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	100 %	1. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	100 %	100 %	
7.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	125%	1. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	45%	142%	1. Realisasi program melampaui target karena meningkatnya penyuluhan PIK-R kepada kelompok remaja yang belum aktif 2. Realisasi kegiatan kurang dari target karena refocussing anggaran

i. BIDANG : PERHUBUNGAN

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Perhubungan, UPT Transportasi

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	KATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RAJA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
----	--------------	--	---------------	---	---	------------

1	Program Pelayanannya Administrasi Perkantoran	100 %	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan pengungkutan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan makan dan minum 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa Tenaga Kerja 13. Penyediaan jasa Tenaga Kerja Honorer/TITL 14. Penyediaan jasa Keamanan Kantor	100 %	100 %	
2	Program peningkatan disiplin aparat	100 %	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100 %	100 %	
3	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	Pelayanan BLUD	100 %	100 %	

4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 %	100 %	
5	Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	100 %	1. Pembangunan gedung kantor 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	100 %	100 %	
6	Program Peningkatan pelayanan angkutan	60 %	1. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 2. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 3. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 4. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 5. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 6. Pengembangan sarana dan	94 %	64 %	1. Adanya refocusing anggaran APBD Tahun 2020 2. Tidak memungkinkan adanya kegiatan untuk pelaksanaan uji emisi gas buang, dimasa pandemi covid 19

			1. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2. Penyusunan Kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan 3. Koordinasi dengan pemerintahan provinsi dan fasilitas perhubungan 4. Penyiapan pengalokasian terminal angkutan darat 5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 6. Perencanaan dan pengembangan teknologi informasi dan sistem manajemen transportasi perkotaan	98 %	102 %	
7.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	1. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2. Penyusunan Kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan 3. Koordinasi dengan pemerintahan provinsi dan fasilitas perhubungan 4. Penyiapan pengalokasian terminal angkutan darat 5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 6. Perencanaan dan pengembangan teknologi informasi dan sistem manajemen transportasi perkotaan	98 %	102 %	
8.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	60%	1. Pengalokasian marka jalan 2. Pengalokasian Semafor - rambu lalu lintas 3. Pengalokasian APILL	300 %	60%	

			4. Pemeliharaan AP/LI.			
9	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100%	1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	100%	100%	

i. BIDANG : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; Bidang Humas dan Protokol

Tingkat Kesenjangan Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	

			9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Penyelenggaraan Timaga Kotabak			
2	Programa pengembangan pelayanan sipil dan kinerja dan keuangan	100 %	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100 %	100 %	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Tergendamm mebelkur 2. Peneliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 4. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/ berkala mebelkur	100%	100%	
4	Programa kerjasama informasi dengan mas media	100%	1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Penyebarluasan informasi yang bersifat perluudharat bagi masyarakat	99 %	101 %	
5	Programa Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100%	1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2. Pembiayaan dan pengembangan sumber	100%	100%	

			daya komunikasi dan informasi		
6	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	100%	1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	100%	100%

k. BIDANG : KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 Tingkat Kescsuaian Program dan Kegiatan

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan alat tulis kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan komponen instalasi listrik / pemangangan bangunan kantor 5. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 6. Penyediaan makanan dan minuman 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	

			8. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 9. Penyediaan jasa Tenaga Kontrak 10. Penyediaan jasa kebumih-han kantor 11. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100%	100%	
3	Program penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1. Pengadaan mobil/ kendaraan jalan/ berkala 2. Perbaikan jalan/ berkala 3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 4. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil/ kendaraan 5. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	100%	100%	
4	Program Penguatan Ikutir Usaha Kecil Menengah yang Kumuh	95%	1. Penguatan Penguatan Usaha Kecil Menengah 2. Penguatan kinerja/ dan Penguatan Usaha Kecil dan Menengah 3. Jumlah UMK yang mengikuti pelatihan pengembangan UMK	75%	122%	Rata-rata capaian indikator kegiatan kurang dari target karena banyak kegiatan pameran yang dibatalkan karena Pandemi Covid-19

5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ketrampilan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	62%	1. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KULIP 2. Jumlah Calon Wirausaha yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan 3. Persentase Wirausaha Baru 4. Fasilitas pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	60%	69%	Rata-rata capaian indikator program kurang dari target karena kondisi pandemi menyebabkan kurangnya penambahan wirausaha baru
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Raga Usaha Mikro Kecil Menengah	17%	1. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2. Koordinasi pemantauan fasilitas pemerintah	100%	17%	Banyak Kegiatan Pameran yang dibatalkan karena Pandemi Covid-19
7	Program Peningkatan Kualitas Kembangan Koperasi	103%	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama usaha koperasi (DAK) 4. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 5. Kritisasi penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis usaha koperasi 6. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoprasian	189%	116%	

1. BIDANG : PENANAMAN MODAL
Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bagian Perekonomian.
Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan

No	NAMA PROGRAM	BATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	BATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyelenggaraan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan barang celakan dan pengemasan 7. Penyelenggaraan pemrosesan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyelenggaraan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyelenggaraan makan siang dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	100%	100%	

2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	100%	100%	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Penyusunan pelaporan keuangan semester 2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2. Pengadaan Mebel 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kelengkapan Gedung Kantor	700%	100%	
5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	300%	1. Kajian Kebijakan Penanaman Modal 2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	50%	200%	Kata-rata capaian indikator kegiatan kurang dari target karena adanya kesalahan dalam penyusunan dokumen anggaran
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%	1. Peningkatan Insentif Terwujudnya Kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah 2. Pengembangan potensi unggulan daerah 3. Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembiayaan dan	100%	100%	

			Penguasaan Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Penyelenggaraan pameran investasi 5. Peningkatan Kualitas SMM guna peningkatan			
7	Program penyediaan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana Daerah	100%	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	100%	100%	

m. BIDANG : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Penanaman Modal Keperumudaan dan Olahraga; Kecamatan Pasar Kliwon; Kecamatan Banjarsari; Kecamatan Laweyan; Kecamatan Serengan; Kelurahan Tegalarjo; Kelurahan Candekan; Kelurahan Nusukan; Kelurahan Kadipiro

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KEPERANGAN
1	Program Penyediaan dan Peningkatan Perumahan	100%	1. Penyediaan jasa cetak 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa	100%	100%	

			5. Kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan pengkondisian 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peralatan 10. Perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. Penyediaan jasa Keamanan Kantor 14. Penyediaan jasa Tenaga Kontrak			
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100%	100%	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	67%	1. Pemeliharaan gedung/kantor 2. Pemeliharaan	67%	100%	

			rutin/berkala berdasarkan dinas/operasional			Refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid
4	Program Pembinaan dan Penasyarakatan Olah Raga	52%	1. Penulisan dan pembinaan olahraga berbakat 2. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 4. Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 5. Pembinaan Olah raga yang berkembang di masyarakat	62%	84%	
5	Program Pengembangan dan Kewasarian Kebijakan Pemuda	76%	Peningkatan pembinaan dan ketayasan kepemudaan	75%	101%	Rata-rata capaian indikator program dan rata-rata capaian indikator kegiatan kurang dari target karena kegiatan pandemi tidak dilaksanakan, anggaran digunakan untuk pelayanan masyarakat secara langsung
6	Program peningkatan peran serta kepemudaan	60%	1. Pembinaan organisasi kepemudaan 2. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan 3. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda 4. Pembinaan organisasi kepemudaan 5. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi	82%	84%	Rata-rata capaian indikator program dan rata-rata capaian indikator kegiatan kurang dari target karena diawal pandemi tidak dilaksanakan, anggaran digunakan untuk pelayanan masyarakat secara langsung

			anda			
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	50%	1. Pemeliharaan rutinitas/berkala sarana dan prasarana olah raga 2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (DAK) 3. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 4. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (bantuan keuangan provinsi)	50%	100%	Rata-rata capaian indikator program dan rata-rata capaian indikator kegiatan kurang dari target karena pelaksanaan anggaran jumlah yang melebihi yang ditargetkan tidak sesuai target

n. Bidang : Statistik

Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Pekenpaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Jebres, Kecamatan Inspektat, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan :

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT KESUKSESAN PROGRAM DAN	KETERANGAN
----	--------------	--	---------------	--	--------------------------------	------------

				KEGIATAN	KEGIATAN	
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	100%	Penyusunan, Updatis dan analisis data dan statistik daerah	100%	100%	

o. BIDANG : PERSANDIAN

Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan :

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESesuaian PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Persandian	100%	Penyusunan Persandian	100%	100%	

p. BIDANG : KEBUDAYAAN

Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kebudayaan, Museum, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Kerten, Kelurahan Jujur, Kelurahan Laweyan, Kelurahan Karangasem, Kelurahan Pajang, Kelurahan Bumi, Kelurahan Panulatan, Kelurahan Penumpang, Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Purwasari, Kelurahan Soudakan, Kecamatan Serengan, Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Danukusuman, Kelurahan Serengan, Kelurahan Tipes, Kelurahan Krakoran, Kelurahan Jayeng, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Kelurahan Joyusuran, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Lingsih, Kelurahan Bala, Kelurahan Kumpungbaru, Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Tegalliryo, Kelurahan Jebres, Kelurahan Mojosoongo, Kelurahan Sudiropraja, Kelurahan Gadekan, Kelurahan Sewu, Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Jajalan, Kelurahan Parwollingratan, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Kepatihan Wélan, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Banyuwat, Kelurahan Jogo, Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Limuran, Kelurahan Kepribu, Kelurahan Kestalan, Kelurahan Punggawan, Kelurahan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan :

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	100%	1. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air. 2. Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 3. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 4. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 5. Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 6. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 7. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	91%	110%	

			8. Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala 9. Perencanaan dan digitalisasi bahan pustaka 10. Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 11. Pendukung pengelolaan Museum dan Taman Budaya di daerah (JAK non Fisik)			
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	95%	1. Fasilitas Penyelenggaraan festival budaya daerah 2. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 3. Penyelenggaraan dialog kebudayaan 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5. Fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah 6. Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah 7. Fasilitas perkembangan Keragaman Budaya Daerah	67%	142%	Rata-rata capaian indikator kegiatan kurang dari target karena rennunging anggaran
4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	0%	1. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 2. Penyelenggaraan konferensi Kota Heritage 3. Monitoring evaluasi dan	0%	0%	Program dan kegiatan tidak dilaksanakan karena sefokusling anggaran

			pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya			
4	Program Pengembangan Nilai budaya	67%	1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 3. Penemuan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 4. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	63%	107%	Rata-rata capaian indikator program dan rata-rata capaian indikator kegiatan kurang dari target karena refoersing anggaran

q- **BIDANG : PERPUSTAKAAN**

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Danukusuman, Kelurahan Tipes, Kelurahan Kratonan, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Mojo, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Kampungbaru, Kelurahan Tegalarjo, Kelurahan Jebres, Kelurahan Mojosoongo, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Gandekan, Kelurahan Sewu, Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Purwodiningrat, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Jogo, Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Timuran, Kelurahan Keprabon, Kelurahan Kestalan, Kelurahan Punggawan, Kelurahan Mangkubumen, Kelurahan Gilingan,

Tingkat Kecsuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
----	--------------	--	---------------	---	---	------------

1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	50%	1. Penasyaratan minat dan kebiasaan membaca untuk mendukung terwujudnya masyarakat pembelajar 2. Pengembangan minat dan budaya baca 3. Pelaksanaan Koordinasi pengembangan perpustakaan perencanaan dan penyusunan program budaya baca 4. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 6. Penyelesaian bahan pustaka perpustakaan umum daerah 7. Supercisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	50%	50%	Ketercapaian indikator program telah tercapai rendahnya jumlah kunjungan ke perpustakaan akibat pandemi
----	---	-----	--	-----	-----	---

f. BIDANG : KEARSIPAN

Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan	100%	1. Penyelidikan jasa surat	100%	100%	

	Administrasi Perkantoran		menyurat 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Penyediaan jasa Tenaga kontrak			
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1. Pengadaan mebel 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 4. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/ berkala mebel	100%	100%	

3	Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan	100%	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	100%	100%	
4	Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan	100%	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	100%	100%	
5	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	100%	Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta	100%	100%	
6	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	100%	Pendataan dan Pemetaan Dokumen / Arsip Daerah	100%	100%	
7	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	100%	1. Pengumpulan data 2. Pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah	100%	100%	

3. URUSAN ; PILIHAN

a. BIDANG : KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Aneka Usaha Perikanan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi	107%	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	100%	107%	

	Perikanan					
2.	Program pengembangan budidaya perikanan	89%	1	Pengembangan bibit ikan unggul	100%	89%
			2.	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan		
			3.	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan		

b. BIDANG PARIWISATA

Perangkat Daerah Pelaksana Dinas Pariwisata dan UPT Kawasan Wisata

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	BATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	BATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESesuaian PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	100%	100%	

			Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Penyelidikan Jasa Tenaga Kerja 12. Penyelidikan Jasa Keuangan Kantor			
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3. Pembinaan dan Pengembangan Periklanan	100%	100%	
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (Hibah Penerimaan) 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	
4.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	100%	1. Pengembangan sosialisasi dan penjuragan serta pengawasan standarisasi 2. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DAK Fisik) 3. Peningkatan Pemhangan Sarana dan Prasarana pariwisata (Bantuan Keuangan Provinsi) 4. Pengembangan objek pariwisata	100%	100%	

			unggulan (Hubah Pariwisata) 5. Pengembangan objek pariwisata unggulan 6. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia 7. Pengembangan Pariwisata			
5.	Program Pengembangan Komunitas	100%	1. Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 2. Pelaksanaan dengan lembaga lainnya 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan komunitas pariwisata 4. Pengembangan dan Penguatan pasar produk ekonomi kreatif 5. Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 6. Pelaksanaan dengan lembaga lainnya (DAK Non Fisik) 7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan komunitas pariwisata (tulisah Pariwisata)	100%	100%	
6.	Program Pengembangan Pemukiman Pariwisata	100%	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 3. Pengembangan program kerjasama promosi pariwisata 4. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	100%	100%	

--	--	--	--	--	--	--	--

c. **BIDANG : PERTANIAN**

Perangkat Daerah Pelaksanaan: Dinas Pertanian, Kelautan Pangan dan Perikanan, UPT Kesehatan Hewan, UPT Rumah Potong Hewan dan UPT Aneka Usaha Perikanan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	NAMA-KATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA-KATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program pelayanan administrasi pemerintahan	100%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan pengundangan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman III. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	

			11. Penyediaan jasa Tenaga Kerja 12. Penyediaan jasa tenaga kontrak 13. Pengadaan Kendaraan Dinas 14. Pengadaan perlengkapan gedung 15. Pengadaan Meubeler 16. Pemeliharaan rutin/berkala 17. Pemeliharaan rutin/berkala 18. Pemeliharaan dinas operasional 19. Pemeliharaan rutin/berkala meubeler			
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	100 %	100 %	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100 %	100 %	
4	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala meubeler 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100 %	100 %	
5	Program pencegahan dan	72 %	Pemeliharaan kesehatan dan	100 %	72 %	

	penanggulangan penyakit ternak		pengecapan penyakit menular ternak			
6.	Program peningkatan kesejahteraan petani	100%	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	100%	100%	
7	Program peningkatan produktivitas hasil produksi pertanian/perkebunan	100%	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	100%	100%	
8	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	128%	fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional pemasaran hasil produksi peternakan komplementer	100%	128%	
9.	Program peningkatan pencapaian teknologi pertanian/perkebunan	89%	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan kapal guna	100%	89%	Rata-rata capaian indikator program kurang dari target karena keterbatasannya lahan sawah,sebesar 16,2 Ha, dan tidak seluruh dibangun di Irwulan 9
10	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	235%	Pengembangan agribisnis peternakan	100%	235%	Rata-rata capaian indikator program jauh melebihi target karena dengan adanya pandemi covid-19 banyak hewan qurban yang dipotong di KPH
11.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	144%	Pengembangan agribisnis peternakan	100%	144%	Rata-rata capaian indikator program jauh melebihi target karena besarnya jumlah hewan qurban yang masuk ke Surakarta
12.	Program peningkatan	132%	Penyediaan sarana produksi	100%	132%	Rata-rata capaian indikator

	produksi pertanian/ peternakan		pertanian/peternakan			program jauh melebihi target besarnya kesadaraan masyarakat untuk memandatkan pelaksanaan dengan beresok tahun
--	-----------------------------------	--	----------------------	--	--	--

d. BIDANG : PERDAGANGAN
Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Perdagangan,
Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

Nn	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
	Program pelayanan administrasi perkantoran	100%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan korang cetakan pengandaan 8. Penyediaan peralatan dan	100%	100%	

			9. Peningkatan peralatan rumah tangga 10. Peningkatan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 11. Penyediaan air bersih dan minum 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. Penyediaan jasa tenaga kesehatan 14. Penyediaan jasa Tenaga Kerja Monev/ TIL			
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan riptan kinerja dan keuangan	100%	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	
3.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1. Penguasaan kendaraan dinas 2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100%	100%	

4.	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	100%	1. Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 2. Kegiatan pembinaan kelompok berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 3. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	100%	100%	
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	107%	1. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 2. Membangun jejaring dengan eksportir	81%	132%	Rata-rata capaian indikator kegiatan di bawah target karena penurunan pengajuan untuk ekspor akibat pandemi Covid-19
6.	Program Peningkatan Efisiensi Pendayagunaan Dalam Negeri	100%	1. Fasilitas kemudahan penjualan pengembangan usaha 2. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 3. Pengembangan Kemitraan 4. Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan 5. Peningkatan Promosi Perdagangan Dalam Negeri 6. Penyempurnaan peraturan peratutan	100%	100%	
8.	Program Perlindungan Konsumen dan	100%	1. Peningkatan pengawasan perdagangan barang dan jasa	100%	100%	

pengembangan perdagangan	2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kementrian Daerah			
--------------------------	--	--	--	--

e. **BIDANG : PERINDUSTRIAN**
Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAHAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAHAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	100%	1. Fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemantauan Sumber Daya 2. Pemantauan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat Jaringan Kluster Industri 3. Penyusunan Kebijakan Industri terkait dan industri prasarana industri kecil dan menengah 4. Fasilitas kerjasama pembinaan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 5. Fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemantauan Sumber Daya	100%	100%	

			(DBHCLIT) Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dlati memperkuat Jaringan Klaster Industri (DAK)			
2	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	100%	1 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi 2 Fasilitas Promosi dan Perijinan Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	100%	100%	
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	100%	1 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 2 Perluasan penerapan standar praktik Industri manufaktur 3 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (DBHCLIT)	100%	100%	

f. Bidang : Transmigrasi
Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESUKSESAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
----	--------------	--	---------------	---	---	------------

1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	0%	Penyerahan dan Fasilitasi perwujudan serta penerapan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	0%	4%	Ketahanan pangan
---	---	----	--	----	----	------------------

4. URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

a. BIDANG : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Perangkat Daerah Pelaksana: Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Kerja Sama, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Perumahan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Kelahan Pangan dan Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kependidikan, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 5 Kecamatan dan 54 Kelurahan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	100%	Penerapan sistem informasi terhadap pelayanan publik	100%	100%	
2	Program Tenaga Daerah (Monev) Baru	104%	Fasilitasi penerapan SOTK pemerintah daerah otomasi baru	100%	104%	

3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	1. Koordinasi kerjasama pemusatan peraturan perundang-undangan 2. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 3. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 4. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 5. Publikasi peraturan perundang-undangan 6. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru 7. Lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 8. Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 9. Penegakan Produk Hukum Daerah	100 %	99%	
4	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	1. Pembahasan rancangan peraturan daerah 2. Hearing/diálogo dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 4. Rapat-rapat paripurna 5. Kegiatan Reses 6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	100%	

			9. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah 10. Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD			
5	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah	98%	1. Fasilitas/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 2. Fasilitas/pembentukan kerjasama daerah dengan pihak luar negeri 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Daerah	112%	88%	Beberapa kegiatan pelaksanaan kerjasama daerah yang telah dilaksanakan, terdapat pelocusan anggaran akibat pandemi Covid 19
6	Program peningkatan pelayanan kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	1. Dialog/studiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial atau kemasyarakatan 2. Penelitian kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 3. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 4. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 5. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 6. Penyediaan jasa jaminan Peneliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa keamanan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	100%	

			5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggantian 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. Penyediaan jamuan Tamu 14. Penyediaan jasa Tenaga Kontrak 15. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 16. Penyediaan jasa Keamanan Kantor			
8	Program peningkatan disiplin aparatur	100%	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	100%	
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	100%	
10	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1. Penyusunan laporan rapian kinerja dan analisis realisasi kinerja SKRP 2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3. Penyusunan pelaporan keuangan	100%	100%	
11	Program	100%	1. Pumbangunan gedung kantor	100%	100%	

Peningkatan Sarana dan Fasilitas Aparatur		2. Peningkatan peralatan gedung kantor 3. Peningkatan meubelur 4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9. Pemeliharaan rutin/berkala meubelur 10. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 11. Peningkatan perlengkapan rumah jabatan/dinas 12. Peningkatan perlengkapan gedung kantor 13. Peningkatan peralatan rumah jabatan/dinas 14. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 15. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 17. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 18. Pemeliharaan rutin/berkala mobil pribadi		
---	--	---	--	--

b. Bidang : Pengawasan

Perangkat Daerah Pelaksana: Inspektoral, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Panularan, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Setengan, Kelurahan Tipes, Kecamatan Ps Kliwon, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Jebres, Kelurahan Gandekan, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Timuran, Kelurahan Mangkubumen, Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program mengintensifkan penanganan pengaluan masyarakat	112%	1. Penyusunan Standar Mutu Pelayanan 2. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 3. Survey Kepuasan Masyarakat	100%	112%	
2	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100%	1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100%	100%	
3	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatul pengawasan	100%	1. Pelatihan peningkatan tenaga pemeriksa dan aparatul pengawasan	100%	100%	

4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KIPH	52%	1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KIPH 2. Fasilitas Pengaturan Barang dan Jasa 3. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 4. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah 5. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 7. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 8. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (Hibah Partisipasi)	46%	54%	1. Belum dilakukan evaluasi SUPP. 2. Target OPD yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi 20, tetapi hanya diikutkan 11. 3. Indikator Program Persentase OPD yang memiliki human capital tidak digunakan lagi 4. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya arc dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang	100%	100%	

			oetakan dan penggantian 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. Penyediaan jasa Tenaga Kontrak			
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pengadaan mebel 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	100%	

c. Bidang : Perencanaan

Perangkat Daerah Pelaksana: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bagian Perencanaan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Banjarsari, Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Ngipang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penganggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kepemudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Ternakan, Dinas Perdagangan, Metrologi, Bagian Administrasi Pembangunan, Inspektoral, Badan Penadapan, Pengendalian Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 5 Kecamatan dan 54 Kelurahan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESesuaian PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Kearsipan Pemerintahan	100%	1. Instalasi kearsipan dengan rumah usaha/ lembaga 2. Koordinasi pelaksanaan 3. Pengumpulan Data Bagi Hasil 4. Lokasi kearsipan 5. Koordinasi kearsipan wilayah 6. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	100%	100%	
2	Program pengembangan	100%	1. Pengumpulan, update, dan	100%	100%	

	data/informasi		analisis data informasi rapian target kinerja program dan kegiatan 2. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 3. Penyusunan profile daerah			
3	Program Pengembangan wilayah Perbatasan	100%	1. Koordinasi penetapan rencana bila ruang perbaikan	100%	100%	
4	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	100%	1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 2. Simbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	
5	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	1. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	100%	
6	Program perencanaan pembangunan daerah	100%	1. Penetapan RPJMD 2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 3. Penetapan RKPD 4. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 5. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPP) x. 6. Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 7. Penyusunan rancangan RKPD 8. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program dan kebijakan layanan	99%	100%	

			9. Publik 10. Penyusunan rancangan (RP) MID 10. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Keuangan Provinsi)			
7	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	100%	1. Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana 2. Monitoring evaluasi dan pelaporan	100%	100%	
8	Program perencanaan pembangunan ekonomi	100%	1. Penyusunan indikator ekonomi daerah 2. Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100%	100%	
9	Program perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar	100%	1. Koordinasi perencanaan pembangunan perumahan 2. Koordinasi pembangunan dan penyelenggaraan rumah alam/sosial 3. Koordinasi perencanaan dan pembangunan dan sertifikasi perumahan	100%	100%	
10	Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100%	1. Penyusunan perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%	100%	
11	Program perencanaan sosial dan budaya	100%	1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 2. Monitoring evaluasi dan pelaporan	100%	100%	

			3. Koordinasi perencanaan kependudukan dan pemerintahan 4. Koordinasi perencanaan pembangunan masalah sosial dan kesehatan			
12	Program Pel. dan Administrasi Perkamotan	100%	1. Penyediaan jasa surut mati 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan harian dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa Keamanan Kantor 13. Penyediaan jasa Tenaga Kontrak	100%	100%	
13	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan akuisisi realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100%	100%	

		3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pembangunan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	100%

d. Bidang : Keuangan

Perangkat Daerah Pelaksana: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESesuaian PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program peningkatan dan pengendalian keuangan daerah	99%	1. Penyediaan Dana Hibah 2. Bantuan Sosial dan Bantuan Kemanusiaan 3. Identifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4. Peningkatan dan Pengelolaan	100%	99%	

			Pendapatan Asli Daerah 5. Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah 6. Penyusunan analisa standar belanja 7. Penyusunan standar satuan harga 8. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 9. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 10. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 11. Penyusunan rancangan peraturan KDHI tentang penjabaran APBD 12. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 13. Penyusunan rancangan peraturan KDHI tentang Pembiayaan Perubahan APBD 14. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 15. Penyusunan rancangan peraturan KDHI tentang pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 16. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 17. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 18. Peningkatan manajemen		
--	--	--	--	--	--

			19. Penyusunan dan Pengembangan Pengumpulan Caji Deyawai 20. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber-sumber Penetapan Daerah 21. Peningkatan Efektifitas Pengajian Pajak Daerah 22. Peningkatan Akurasi Penetapan Pajak Daerah 23. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah 24. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 25. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD			
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1. Penyelidikan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyelidikan jasa administrasi keuangan 4. Penyelidikan jasa kebersihan kantor 5. Penyelidikan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang utas dan perlengkapan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyelidikan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan makanan dan minuman	100%	100%	

			11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa Tenaga Kontrak.			
3	Program peningkatan disiplin aparat	100%	Pengadaan mesin/kartu absensi	100%	100%	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	100%	
5	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	Pembinaan Keuangan BLUD	100%	100%	
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhlaq realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan Laporan Pemotongan / Pemungutan & Penyeteroran Pajak Atas Belanja Daerah 4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pengadaan peralatan gedung/kantor 2. Pengadaan mebel 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala mebel	100%	100%	

		7. Kehadiran siswa/berat gedung kantor			
--	--	---	--	--	--

e. Bidang : Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pangkat Daerah Pelaksana: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Inspekturat

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program fasilitasi pindah/ pindah tugas PNS	100%	1. Kemudahan pegawai yang pensiun 2. Pemindahan tugas PNS	100%	100%	
2	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	100%	1. Peningkatan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 2. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 3. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 4. Seleksi penerimaan calon PNS 5. Pemupukan PNS 6. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 7. Pemberian penghargaan bagi PNS	100%	100%	

			yang berprestasi - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS - Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat - Penyusunan Silabi - Penyusunan Materi - Penyusunan Pedoman Diklat - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi - Fasilitas Profesi Aparatur Sipil Negara - Penilaian, Pengawasan, dan Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara			
3	Program Pendidikan Kedisiplinan	100%	- Pendidikan penjenjangan struktural - Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	100%	100%	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	- Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	

			10. Penyediaan bahan bakar dan peraturan peruntuk-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. Penyediaan jasa Tenaga Kontak			
5	Program peningkatan disiplin aparatur	100%	1. Pengadaan mesin/kartrid operasi 2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	100%	
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 4. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	100%	100%	
7	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan : layanan kinerja dan keuangan	100%	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1. Pengadaan mebelur 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebelur.	100%	100%	

f. Bidang : Penelitian dan Pengembangan

Perangkat Daerah Pelaksana: Solo Technopark, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan:

No	NAMA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN	TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah	100%	1. Koordinasi pengembangan dan penerapan Iptek 2. Fasilitas Hilirisasi Riset 3. Peningkatan Kapasitas Kembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 4. Fasilitas Pengembangan dan Penerapan Iptek 5. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 6. Pengembangan Smart City	100%	97%	

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan daya saing perekonomian yang berbasis budaya, usaha mikro kecil dan menengah, serta industri kecil menengah	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo	Meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggal dan meningkatkan pendapatan asli daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian daerah optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam keuangan dan perbankan serta mampu bersaing
2	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan WTP	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar pemerintahan yang telah diterima secara umum.
3	Peningkatan kualitas pelayanan publik, berkeadilan, kependudukan dan optimalisasi pencapaian reformasi birokrasi menuju kota tangguh bencana (resilience city), terasusuk berketahanan pangan dan energi	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Modal Pemertintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Untuk Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan	Dalam rangka pengembangan usaha air minum dalam kemasan maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta akan melakukan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Surakarta. Tujuan Penyertaan Modal Pemertintah Daerah

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			a. peningkatan pelayanan pada masyarakat di bidang penyediaan air minum; b. keuntungan berupa pembagian hasil dan pertumbuhan nilai Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi; d. peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
4	Peningkatan ketersediaan perumahan yang layak huni peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana infrastruktur, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta	Kondisi penyediaan layanan PTU di Daerah yang belum optimal dan efisien menyebabkan tingginya biaya energi listrik yang dibayarkan Pemerintah Kota Surakarta maka diperlukan upaya untuk meningkatkan standar dan mutu dari alat penerangan jalan di Daerah yaitu dengan cara melakukan kerjasama melalui skema KPBU.
5	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan WTP	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah,

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN STRATEGIS YANG DISERBUKAN	(1)	(2)	(3)	(4)
6	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan WTP	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.	6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.	6
7	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan WTP	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	bagaimana untuk mewujudkan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan maka diberikan pengurangan secara menyeluruh	7	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	bagaimana untuk mewujudkan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan maka diberikan pengurangan secara menyeluruh	7
8	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan WTP	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Perusahaan Taman Satwa Liris Liris Surakarta	bagaimana dari pengelolaan modal daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah dengan	8	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Perusahaan Taman Satwa Liris Liris Surakarta	bagaimana dari pengelolaan modal daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah dengan	8

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			pertimbangan dan kajian yang matang demi optimalisasi pemanfaatan keuangan daerah yang tepat dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta; pengurangan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta merupakan upaya untuk memberikan kepastian pemanfaatan atas sejumlah modal dengan memasukkan kembali menjadi bagian keuangan daerah karena tidak dapat digunakan sesuai rencana;
9	Peningkatan perlindungan sosial bagi Penduduk miskin non potensial; peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); peningkatan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial, pengembangan kewirausahaan pemuda	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan. Hal ini berakibat disharmoni sosial dan ketidakadilan serta terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Perda ini bertujuan menjamin kedudukan dan hak asasi penyandang disabilitas serta menjamin hak dan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISEBAHKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			kesempatan penyandang disabilitas
10	Peningkatan kompetensi dan penempatan aparat sipil negara secara profesional berdasarkan "merit system".	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Peningkatan dan Penguatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah	Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki serta kebutuhan organisasi
11	Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Pengawasan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terkuai dan seragam
12	Peningkatan pengkajian keuangan daerah untuk mempermudah WTP	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Kota Surakarta dapat melaksanakan kegiatan/program/kegiatan bantuan keuangan yang bersifat umum, terdistribusi melalui Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan DPRD
13	Penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni; penataan kawasan permukiman komuh; penataan pemukiman umum, dan peningkatan akses sanitasi dan air bersih yang layak, serta	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembantuan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan	Untuk meningkatkan kelayakan tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surakarta yang kesulitan mewujudkan rumah yang layak huni

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	sertifikasi tanah masyarakat.	dan Belanja Daerah Kota Surakarta	
14	Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3.1 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta	Memberikan remunerasi berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan BLUD UPT Puskesmas Kota Surakarta
15	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik mendukung terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3.2 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama	Mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru, tahapan pelaksanaan, pendataan ulang peserta didik, perpindahan peserta didik, ketentuan rombongan belajar, serta pelaporan dan pengawasan kegiatan PPDB
16	Penyerahan dokumen statistik sektoral dengan data yang lengkap, akurat dan mutakhir sesuai dengan kebutuhan	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Teknologi pengamanan melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, otentikasi, integritas, dan anti penyangkalan data/informasi
17	Peningkatan kesiwadayaan masyarakat dalam pembangunan	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1.1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Optimisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan agar bermanfaat bagi masyarakat

TUJUAN MASALAH YANG DISPESAIKAN	DASAR HUKUM	KEBIJAKAN STRATEGIS	NO.
---------------------------------	-------------	---------------------	-----

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

18 Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Pemerintah Kota Surakarta		
--	--	--	--

19 Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta		
--	---	--	--

20 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan status gizi, peningkatan kematian Ibu, bayi dan balita; pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Corona Virus Disease 2019 di Kota Surakarta	20 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan status gizi, peningkatan kematian Ibu, bayi dan balita; pencegahan penyakit menular dan tidak menular	20 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan status gizi, peningkatan kematian Ibu, bayi dan balita; pencegahan penyakit menular dan tidak menular
--	--	--	--

21 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan status gizi, peningkatan kematian Ibu, bayi dan balita; pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan	21 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan status gizi, peningkatan kematian Ibu, bayi dan balita; pencegahan penyakit menular dan tidak menular	21 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan status gizi, peningkatan kematian Ibu, bayi dan balita; pencegahan penyakit menular dan tidak menular
--	--	--	--

- Pengalihan sebagian dana DAU tambahan kabupaten untuk kegiatan produk yang berbasis bidang ketahanan pangan, inovasi produk dan/ atau usaha baru			
---	--	--	--

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	menular; peningkatan skrining kesehatan; dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit; peningkatan partisipasi dan prestasi olahraga	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	yang mendukung sesuai kebutuhan pasar • Penyesuaian pendapatan dan belanja BLUD dalam rangka optimalisasi pelayanan BLUD
22	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan WTP	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019	Untuk memenuhi ketentuan Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surakarta TA 2019
23	Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2020	Untuk menyesuaikan perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dengan dinamika pembangunan dan menciptakan keselarasan program RKPD dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021
24	Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021	Sebagai landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan renja perangkat daerah.
25	Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Surakarta melalui pelayanan satu atap yang mudah, murah dan cepat
26	Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2020 Tentang Program Konsultasi	Pedoman operasional untuk keterpaduan operasional konsultasi pranikah calon pengantin dan meningkatkan peran serta mitra kerja dalam

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
27	Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh OPD sesuai dengan tupoksinya
28	Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penunjuk Teknis Lembagan Gaji Kutiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2020	Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah
29	Peningkatan perimbangan sosial bagi penduduk miskin non potensial peningkatan pemanfaatan dokumen kependudukan dengan pelayanan jaminan sosial kesehatan bagi penerima bantuan iuran di Kota Surakarta	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19 tahun 2020 tentang sistem informasi pelayanan dokumen kependudukan dengan pelayanan jaminan sosial kesehatan bagi penerima bantuan iuran di Kota Surakarta	Sinkronisasi data kepesertaan dengan dinas sosial dan informasi pelayanan kependudukan dengan pelayanan jaminan sosial kesehatan bagi penerima bantuan iuran di Kota Surakarta
30	Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan yang bersih dan sehat serta mengurangi permasalahan lingkungan global warming

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
31	Peningkatan data dan informasi yang akurat dan pilah gender	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta	Tersedianya database Perangkat Daerah yang valid dan akuntabel dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan terintegrasi seluruh data di Kota Surakarta
32	Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Profesional Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo TECHNOPARK	Sebagai pedoman pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional karena adanya perubahan proses pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT Solo Technopark
33	Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); peningkatan status gizi; pengurangan kematian Ibu, bayi dan balita; pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular; peningkatan skrining kesehatan; dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit; peningkatan partisipasi dan prestasi olahraga	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Surakarta	Untuk melindungi segenap masyarakat di Kota Surakarta dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta bertujuan menjamin pelaksanaan protokol kesehatan, pelaksanaan isolasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kota Surakarta
34	Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surakarta	Melaksanakan ketentuan Perarap Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Informasi Hukum Nasional dalam upaya pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
35	Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat (LHBS) peningkatan status gizi pengurangan kematian Ibu, bayi dan balita; penurunan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; peningkatan skoring kesehatan; dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit; peningkatan partisipasi dan prestasi olahraga	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai TUpaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Surakarta	Penyuluhan layanan kepada masyarakat secara cepat tepat dan akurat
36	Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Jadwal Revisi Arsip Pemerintah Kota Surakarta	Sebagai pedoman dalam penyusunan atau jadwal revisi arsip. Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen kearsipan maka perlu dan wajib ada program kearsipan arsip di lingkungan akhir dalam daur hidup kearsipan sesuai rencana, dan pemanfaatan dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
37	Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Letupuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Etak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan	Untuk mengatur pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021	
38	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan WTP	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Merundaklanputi Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga TA 2020, Peratruran Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampak Akibat Pandemi Covid-19, serta Surat Penetapa Pemberian Hibah Pariwisata TA 2020.
39	Peningkatan Penliku hidup bersih dan sehat (PHRS); peningkatan status gizi; pengurangan kematian Ibu, bayi dan balita, pencegahan dan penanganan penyail menular dan tidak menular; peningkatan skrining kesehatan; dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit; peningkatan partisipasi dan prestasi olahraga	Peraturan walikota surakarta nomor 32 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan walikota nomor 24 tahun 2020 Tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona virus disease 2019 di Kota Surakarta	Penyesuaian pengaturan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid 19
40	Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMD Kota Surakarta

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
-----	---------------------	-------------	----------------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

41	Peningkatan partisipasi anak usia 3-6 tahun dalam PAUD	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 tahun 2020 tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Kota Surakarta Dalam Rangka Implementasi Standar Teknik Pelayanan Pendidikan	Mengatur terkait SPN PAUD dan pelaksanaan program PAUD satu tahun pra sekolah.
----	--	---	--

42	Peningkatan daya tarik investasi di Kota Surakarta melalui penyediaan aksesibilitas dan potensi usaha sektor riil	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 32.1 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Hibah Partisipasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	Membentuk dasar hukum dan kejelasan pelaksanaan dan kejelasan hibah partisipasi dan pemberian insentif sebagai stimulus ekonomi bagi pelaku usaha terdampak yang berpengaruh pada pendapatan asli daerah sehingga dimungkinkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas
----	---	---	---

43	Peningkatan pelayanan perpustakaan umum, perpustakaan komunitas dan pemukiman standar pada perpustakaan koleksi	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Mengatur pemertnahan dan pengalokasian perpustakaan di Kota Surakarta untuk meningkatkan pelayanan publik
----	---	---	---

44	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk memperlakukan WTP	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021	Mengatur penjabaran APBD Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 Perda No 6 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021
----	---	--	---

45	Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan status gizi, peningkatan kematan ibu bayi dan kualitas lingkungan dan	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Pencapaian Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan	Penerapan disiplin dan pencapaian hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid 19 untuk masyarakat
----	---	--	--

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	ASAS HUKUM	SIKAP/AN/MASALAH YANG DI SELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	penanganan penyakit menular dan tidak menular; peningkatan skrining kesehatan; dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit; peningkatan partisipasi dan prestasi olahraga	Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Surakarta	kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, pelaksanaan isolasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Surakarta
46	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan WTP	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta	Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan dalam APBD dapat berjalan lancar, efektif, efisien, akuntabel, transparan, memperhatikan asas kepatutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
47	Peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Pedoman Kode Etik bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kota Surakarta sehingga dapat meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Surakarta yang terbuka/transparan, bersih dan akuntabel

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN

SERILUMNYA

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	(1) Dinas Pendidikan harus lebih awal memasukkan data siswa penerima BPNKS. Komunikasi dan koordinasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan dilanjutkan	(2) Rekomendasi telah ditindaklanjuti sehingga proses pencatran BPNKS dapat dilakukan pada tanggal 2 November 2020, lebih awal dibandingkan pencatran BPNKS tahun 2019 dilakukan pada bulan Desember 2019	(3) Optimalisasi pelayanan RSUD
2.	(1) Belum terakreditasi RSUD Bung Karno bekerjasama dengan BPJS, koordinasi intensif terkait realisasi kerjasama RSUD Bung Karno dengan BPJS	(2) 1. Terjadi pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa melakukan proses akreditasi. Berdasarkan SE Nomor HK.02.01/MENKES/455 /2020 huruf B poin 3.4 bahwa Rumah Sakit yang akan dilakukan akreditasi untuk membuat pelayanan komitmen upaya peningkatan mutu. Pelayanan komitmen tersebut dapat digunakan sebagai persyaratan kerjasama dengan BPJS. Sehingga dengan komitmen tersebut RS BK dapat bekerja sama dengan BPJS per 1 Januari 2021 meskipun belum terdapat sertifikat akreditasi. 2. Selalu melakukan koordinasi dan konsolidasi tentang pengajuan MOUT RS dan BPJS, sehingga saat ini sudah melakukan tunda	(3) Optimalisasi pelayanan RSUD

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		lengan MOU kredensial sehingga pada tanggal 01 Januari 2021 Rumah sakit Bung Karno sudah bisa menerima pasien BPJS 5. Senantiasa dilakukan pendampingan/ pembinaan terhadap RS Bung Karno untuk persiapan Survey Akreditasi	
3.	Tidak jelasnya Tupoksi antara DKK dan Dinas Sosial dalam pengurusan kepesertaan BPJS PBI APBD Kota Surakarta. Pemerintah Kota harus menunjuk OPD selaku leading sektor kepengurusan kepesertaan BPJS	1. Sesuai Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2019 Dinas Kesehatan setiap bulan melakukan integrasi JKN KIS PBI APBD yang di biayai oleh pemerintah daerah 2. Untuk update data kepesertaan PBI di Dinas Sosial sesuai dengan PKS tentang kepesertaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah kota Surakarta 3. Update data PBI APBD yang masuk DTKS di Dinas Sosial yang tidak masuk DTKS bisa di usulkan di PBI APBD Kota Surakarta	Optimalisasi peran Pemerintah Kota dalam layanan kesehatan.
4.	Kurangnya ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota agar mengusahakan ketersediaan lahan	1. Diperlukan pengadaan pembelian lahan untuk RTH namun terkendala penganggaran yang terbatas; 2. Meningkatkan kualitas RTH yang menjadi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTH

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MAHALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Terlambatnya penanganan jalan berlubang, OPD terkait untuk melaksanakan secara swakelola	Sudah dilaksanakan pembaikan secara berlanjut berikutnya menambah tim swakelola pemeliharaan jalan dan sarana prasana	Peningkatan jalan
6.	Banyaknya penyusutan drainase, Maksimalisasi pendataan dan penarikan kontribusi daerah (bangunan di atas drainase)	1. Menyusun standar teknis kriteria pencapaian sarana akan disusulkan di APBDP 2021 2. Sosialisasi standar teknis dan pendataan 3. Bersamaan Peningkatan Pembinaan Ruang membentuk Pembinaan Ruang Pembinaan Pembinaan Ruang	1. Peningkatan Pemantauan Ruang di atas saluran agar tidak mengganggu fungsi saluran 2. Optimalisasi Rombust pemakaian kekayaan daerah
7.	Masih banyak kawasan kumuh yang belum tertangani. Untuk lebih meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota, PT KAI dan BRWS Bengawan Solo terkait penanganan kawasan kumuh	1. Berdasarkan Update SK Kawasan Kumuh Tahun 2020, masih ada 135,971 ha Kawasan kumuh yang belum tertangani pada tahun 2020 2. Sebagian wilayah kumuh di area squatter yang sulit untuk ditangani karena termasuk wilayah PT.	Target pengurangan kawasan kumuh seluas 135,971 ha akan diselesaikan dalam 5 tahun mendatang

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		KAI dan kawasan cagar budaya (keraton) sehingga telah dikeluarkan dari peta wilayah kumuh yang terbaru. Sebelumnya sudah dilakukan koordinasi dengan pihak PT. KAI dan Keraton namun belum menemui titik temu 3. Untuk kawasan kumuh di wilayah BBWS Bengawan Solo sudah dilakukan permohonan hibah lahan BBWS Bengawan Solo kepada Pemerintah Kota seluas ± 19.000 m² di kawasan Semanggi utara yang akan digunakan penataan hunian. Proses saat ini masih menunggu ijin penggunaan SDA oleh Menteri PUPR 4. Pengurangan kawasan kumuh masih terkendala dengan terbatasnya anggaran, selain dari APBD juga dilakukan pendanaan penanganan kawasan kumuh melalui dana DAK Kementerian PUPR, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Loan Bank Dunia.	
8.	Target 100-0-100 belum tercapai. Optimalisasi target 100-0-100	1. Meningkatkan peningkatan akses air minum dan sanitasi melalui pembangunan jaringan distribusi air	Dapat memberikan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat serta

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DIPESESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		berdiri dan air limbah yaitu dengan pemasangan mastermeter, pemeliharaan IPAL komunal, dan perbaikan drainase lingkungan 2. Penguatan masyarakat dengan air minum dan sanitasi kerja sama dengan organisasi LUWASH PLUS 3. Koordinasi dengan Perumda Air Minum dan Limas PLIR dan Pendidikan dari APBN, Bantuan Keuangan Provinsi, dan DAK Kementerian PUPR.	untuk menyelesaikan permasalahan BABS
9	Tidak terverifikasi data yang up to date sehingga dalam memberikan bantuan sosial masih menunggu hasil turunan Rappoda maka Rappoda harus memberikan data yang up to date	Data Warga miskin ditetapkan melalui SK Walikota 2 kali dalam setahun. Data tersebut didapatkan dari F-SIK yang diverifikasi dan tervalidasi. Meskipun data dalam F-SIK mengalami update harian, akan tetapi pembaruan laporan sosial kepada warga miskin tetap didasarkan pada legal formal SK Walikota tersebut	Tetap mengacu pada SK Walikota terhadap penetapan warga miskin
10	Pelaporan foto antara keuangan antara BLUD keuangan BLUD antara BLUD keuangan antara BLUD Transparansi dengan anggaran dinas belum jelas Perlu pemeliharaan antara pelaporan keuangan, BLUD	Kegiatan yang didanai menggunakan anggaran BLUD sudah dicantumkan dalam perencanaan RRA (Rencana Disinis Anggaran). Pelaporan rutin menggunakan BLUD	Akuntabilitas laporan foto mengelola keuangan

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	dengan keuangan APBD	disahkan pihak BPPKAD, dan Laporan Keuangan BLUD UPT Transportasi sudah diaudit oleh Konsultan Akuntan Publik (KAP) rutin setiap tahun	
11.	Tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penerbitan perizinan OSS. Untuk lebih dipergelas koordinasi tentang kewenangan dari pemerintah daerah dengan pusat terkait perizinan OSS	Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah tidak lagi menerbitkan ijin, tetapi yang menerbitkan adalah lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota berdasarkan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) dari Kementerian/ Lembaga	Mengirimkan surat ke BKPM selaku Lembaga yang mengelola OSS, karena banyak perizinan yang diterbitkan oleh OSS tidak sesuai dengan peraturan di daerah
12.	Belum dapat menyediakan database yang valid. OPD terkait harus menyediakan database solodata	Pemudahan pengelolaan Solodata kepada Diskominfo SP Penyusunan SOP Solodata Penganggaran kegiatan pengembangan aplikasi Solodata Renja 2022 tentang Pengembangan Data Analitik	Tersedianya database Perangkat Daerah yang valid dan akuntabel dengan tujuan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah
13.	Sentra IKM Semanggi Harmoni kurang berfungsi secara maksimal. Lebih mengoptimalkan pemanfaatan Sentra	Sejak selesai pembangunan di tahun 2019, Sentra IKM Semanggi telah dimanfaatkan untuk	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi wilayah dan kearifan lokal 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

NO.	REKOMENDASI DKPD	(1)	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
14.	Kurang maksimalnya luncuran Rapenda	1. Tahun 2019 • Menemuka kunjungan studi banding dari Disperindag Kabupaten Bogor, IKM Kabupaten Sleman, Dekranasda Kabupaten, Peserta Pelatihan wirasaha Solo Techno Park, Akademi Komunitas Industri Tekstil Solo, Dosen Nasional Of University dan Singapura pendamping dosen teknik industri UNS • Belajar karawitan IKM SAWAGI, Belajar batik dari mahasiswa luar negeri program AIFSEC dan UNS, Belajar manajemen dari permasalahan mahasiswa STAN Jakarta dengan IKM Masvita, Belajar IT-Digital Start Up - IKM Digital Innovation Lounge • Proses produksi kain batik IKM Batik Kauman dan IKM Batik Laweyan 2. Tahun 2020 Pelatihan pembuatan blangkon	1. Meningkatkan keahlian lokal dalam pemangguhan berbagai kegiatan antara lain: 3. Meningkatkan Keahlian Penduduk lokal dalam memproduksi barang tertentu Meningkatkan edukasi dan vokasi masyarakat dalam industri kreatif 4. Meningkatkan destinasi wisata sektor industri kreatif	lokasi dalam pemangguhan berbagai kegiatan antara lain: 3. Meningkatkan Keahlian Penduduk lokal dalam memproduksi barang tertentu Meningkatkan edukasi dan vokasi masyarakat dalam industri kreatif 4. Meningkatkan destinasi wisata sektor industri kreatif
		(2)	(3)	(4)

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	dari pemerintah kota. Untuk penyusunan Raperda yang ada di OPD terlihat kurang fokus dikerjakan. Apabila dimungkinkan bisa dijadikan Raperda inisiatif	Koordinasi intensif dengan Seluruh Perangkat Daerah terkait pengajuan usulan Raperda kepada Bagian Hukum	hambatan yang dialami khususnya dalam proses penyelesaian penyusunan Naskah Akademik/ draft Raperda
15.	Dalam suatu pelaporan keuangan, bila dalam perencanaan sudah diantisipasi jangan lagi dipakai sebagai alasan permasalahan apabila target tidak tercapai. Asumsi yang sudah disampaikan dalam perencanaan jangan dijadikan alasan dalam mencapai target pendapatan.	Dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan sudah berdasarkan perhitungan kemampuan capaian yang dapat diraih. Dari Hasil evaluasi realisasi pendapatan terdapat beberapa objek pendapatan (khususnya retribusi) yang mengalami Force Majeur. Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pendapatan tahun-tahun berikutnya.	
	OPD yang menghasikan retribusi kurang serius dalam mencapai target. Disarankan apabila memungkinkan secara legalitasnya agar bisa dilakukan oleh satu OPD (dalam hal ini BLTKAD)	Berdasarkan Perda SOTK, tugas pokok dan fungsi tetap pada Perangkat Daerah pengampu Retribusi	

Arsip DPRD Kota Surakarta

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pelaksanaan tugas pembantuan merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

B. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Kota Surakarta tidak menerima tugas pembantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi

Arsip DPRD Kota Surakarta

BAB V

PENUTUP

Penyusunan LKPJ Walikota Surakarta Tahun 2020 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021.

Berpedoman pada RKPD Tahun 2020, Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2020 diarahkan untuk **“Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Menuju Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”** dengan prioritas pembangunan meliputi : Mengoptimalkan upaya mengatasi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antar wilayah yang berdampak pada akses kesejahteraan masyarakat; Pemerataan infrastruktur di wilayah tertinggal untuk pemerataan kualitas pelayanan publik; Peningkatan pendapatan kelompok rentan; Peningkatan kemampuan hidup produktif bagi kelompok rentan; Penegakan pemanfaatan ruang yang tidak merusak lingkungan; dan Penguatan kesiagaan masyarakat untuk antisipasi bencana (baik bencana alam maupun bencana sosial).

Kondisi pandemi Covid-19 membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di kota Surakarta. Dampak terbesar terlihat pada kondisi sosial ekonomi masyarakat dimana beberapa indikator sosial ekonomi mengalami koreksi dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi ini membuat pemerintah daerah dan pemerintah pusat, harus menempuh kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, yang mengubah hampir semua asumsi dalam APBD Tahun 2020.

Secara umum seluruh kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun

Arsip DPRD Kota Surakarta

demikian disadari bahwa masih ditemui adanya permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja tahun berikutnya guna meningkatkan optimalisasi capaian target kinerja, efisiensi dan efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Demikian LKPJ Walikota Surakarta Tahun 2020 ini disusun dan disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, atas bantuan serta kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar: Bidang Pendidikan

[illegible]

[illegible]

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SMP Negeri 7	Peningkatan informasi, edukasi, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perbaikan								115%		
SMP Negeri 8	Peningkatan informasi, edukasi, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perbaikan		12	12 bulan			100%				
										115%		
SMP Negeri 9	Peningkatan informasi, edukasi, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perbaikan		12	12 bulan			100%				
										115%		
SMP Negeri 10	Peningkatan informasi, edukasi, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perbaikan		12	12 bulan			100%				
										115%		
SMP Negeri 11	Peningkatan informasi, edukasi, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perbaikan		12	12 bulan			100%				
										115%		
SMP Negeri 12	Peningkatan informasi, edukasi, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perbaikan		12	12 bulan			100%				
										115%		
SMP Negeri 13	Peningkatan informasi, edukasi, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perbaikan		12	12 bulan			100%				
										115%		
SMP Negeri 14	Peningkatan informasi, edukasi, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perbaikan		12	12 bulan			100%				
										115%		

[illegible]

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SMK Negeri 13	Peningkatan informasi literasi pemustaka daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbaca dan Terlihat	12 bulan	100%				125%			
		Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik										
SMK Negeri 20	Peningkatan reformasi birokrasi pemustaka daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbaca dan Terlihat	12 bulan	100%				125%			
		Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik										
SMK Negeri 27	Peningkatan informasi literasi pemustaka daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbaca dan Terlihat	12 bulan	100%				125%			
		Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik										
SMK Negeri 22	Peningkatan informasi literasi pemustaka daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbaca dan Terlihat	12 bulan	100%				125%			
		Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik										
SMK Negeri 23	Peningkatan informasi literasi pemustaka daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbaca dan Terlihat	12 bulan	100%				125%			
		Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik										
SMK Negeri 24	Peningkatan informasi literasi pemustaka daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbaca dan Terlihat	12 bulan	100%				125%			
		Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik										

[illegible]

		6		7		8		9		10		11	
Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian
Tingkat Pelaksanaan	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian
Tingkat Pelaksanaan	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian
Tingkat Pelaksanaan	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian
Tingkat Pelaksanaan	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian	Kategori	Indikator	Uraian

Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan (PDD) PAUD									
Program Pendidikan Anak Usia Dini		Evaluasi Program		Indikator		Penilaian		Catatan	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini

[illegible]

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cetak Kualifikasi	Peningkatan Angka Partisipasi Murni Pendidikan dasar, menengah kebawah dan SD/PAUD, SD/MI, dan SMP	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan									
		Program Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi ST-D-IV	100	90 persen	93%	40%	Kemungkinan guru yang memenuhi dan penyesuaian yang belum mendapatkan pelatihan (40%)	Rekrutmen guru baru sudah menggunakan sistem online untuk pendataan SD			
		Program Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi ST-D-IV	90	45 persen	50%		Kemungkinan guru baru SD/MI dan penyesuaian Program Pendidikan (40%)	Rekrutmen guru baru SD/MI dan penyesuaian APN/TA 2020			
		Program Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi ST-D-IV	100	90 persen	94%		Kemungkinan guru baru yang memenuhi dan penyesuaian yang belum mendapatkan pelatihan (40%)	Rekrutmen guru baru sudah menggunakan sistem online untuk pendataan SD			
		Program Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi ST-D-IV	100	80 persen	40%		Kemungkinan guru baru SD/MI dan penyesuaian Program Pendidikan (40%)	Rekrutmen guru baru SD/MI dan penyesuaian APN/TA 2020			
		Program Kepala Sekolah SD/MI yang layak mengajar	100	100 persen	0%		Program Kepala Sekolah SD/MI yang layak mengajar	Rekrutmen Kepala Sekolah SD/MI yang layak mengajar			
		Program Kepala Sekolah SD/MI yang layak mengajar	100	100 persen	0%		Program Kepala Sekolah SD/MI yang layak mengajar	Rekrutmen Kepala Sekolah SD/MI yang layak mengajar			
		Program Kepala Sekolah SD/MI yang layak mengajar	100	100 persen	0%		Program Kepala Sekolah SD/MI yang layak mengajar	Rekrutmen Kepala Sekolah SD/MI yang layak mengajar			

	Jumlah siswa yang mengikuti lomba	260	260 seluruh	100%		
	Jumlah website yang mengadun konten COVID-19, PISA, MAPSI, MAFESIP, JAWABATI	260	260 seluruh	100%		
	Siswa dengan kegiatan Sekeloa Desertion Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1851 /DK/MD/2013 tentang Pembinaan dan pembinaan Pelanggaran Lomba-lomba, meliputi: Pusat Kajian Komite Olimpiade Sains Nasional (PKSN) menjadi Kompetisi Sains Nasional	3	Pengujian			
	Berkas hasil uji, hasil dan kriterianya menurut proses pembelajaran	7	73, kesatuan	100%		
	Pengembangan Kompetensi Terampil Anak Jumlah SD/MI yang mendapat kardus pengalihan CIL	242	242 seluruh			Rendahnya anggaran kegiatan ini karena COVID-19
	Pengembangan Kemampuan Terampil Anak Jumlah kegiatan PKM, PSMP, KITA	1	0 keseluruhan			Pengaruhnya terhadap kemampuan COVID-19 tidak terdapat
	Pengembangan materi belajar mengajar dan jurnal guru yang mengikuti workshop	260	260 seluruh	100%		
	Terdapat atau tidak sebagai media interaktif siswa	3	3 seluruh	100%		
	Pengembangan materi belajar mengajar dan materi lain dalam pelatihan pelatihan TKK di sekolah dan melalui materi Diklat SD	7	73 kesatuan			Pengaruhnya terhadap kemampuan COVID-19 tidak terdapat
	Kepribadian sebagai orang tua siswa SD					
	Jumlah SD yang dimiliki siswa keluarga	12	12 seluruh	100%		
	Pada tahun pelajaran SD/MI mengajar DAKI	1	1 seluruh	100%		
	Pembangunan ruang guru beserta pendukung SD/MI Binaungin 3	1	1 seluruh	100%		
	Pembangunan gedung sekolah SD (TUD)					
	Jumlah SD/MI yang dibangun sebelumnya	3	3 seluruh	100%		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SMK Negeri 13	Peningkatan Angka Partisipasi Utama pendidikan dasar, menengah, tinggi SD/MI dan SMP/MTs, dan Kompetensi guru SD/MI dan SMP	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun									
		Pembelajaran rutin/terbuka bangunan sekolah									
		Terpelembagaan bangunan sekolah									
		Pembelajaran rutin/terbuka bangunan sekolah									
		Terpelembagaan bangunan sekolah									
SMK Negeri 14	Peningkatan Angka Partisipasi Utama pendidikan dasar, menengah, tinggi SD/MI dan SMP/MTs, dan Kompetensi guru SD/MI dan SMP	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun									
		Pembelajaran rutin/terbuka bangunan sekolah									
		Terpelembagaan bangunan sekolah									
		Pembelajaran rutin/terbuka bangunan sekolah									
		Terpelembagaan bangunan sekolah									
SMK Negeri 15	Peningkatan Angka Partisipasi Utama pendidikan dasar, menengah, tinggi SD/MI dan SMP/MTs, dan Kompetensi guru SD/MI dan SMP	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun									
		Pembelajaran rutin/terbuka bangunan sekolah									
		Terpelembagaan bangunan sekolah									
		Pembelajaran rutin/terbuka bangunan sekolah									
		Terpelembagaan bangunan sekolah									

[illegible]

[illegible]

		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
SMP Negeri 25	Peningkatan Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar, Aulas ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs, dan kompetensi guru SD/MI dan SMP																								
SMP Negeri 26	Peningkatan Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar, Aulas ruang kelas SD/MT dan SMP/MTs, dan kompetensi guru SD/MT dan SMP																								
SMP Negeri 27	Peningkatan Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar, Aulas ruang kelas SD/MT dan SMP/MTs, dan kompetensi guru SD/MT dan SMP																								

Arsip DPRD Kota Surakarta

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Uraian Kegiatan	Pembelatan, retribusi, beasiswa, pemeliharaan daerah dan upaya peningkatan kondisi pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	51
-----------------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

[illegible]

No		Kategori		Sub Kategori		Detail Kegiatan		Durasi		Anggaran		Status		Catatan	
Pembinaan Karyawan	Peningkatan informasi, koordinasi, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pembinaan Karyawan	Peningkatan informasi, koordinasi, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pembinaan Karyawan	Peningkatan informasi, koordinasi, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

[illegible]

No		Kategori		Indikator		Batas Waktu		Tipe		Skor		Bobot		Total	
Indikasi Formal	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik
Indikasi Informal	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur publik

No		Kategori		Indikator		Tingkat		Waktu		Sumber		Tipe		Materi		Metode		Penilaian		Catatan	
Kategori Sakti Utama Dewi Bung Zinn																					
Kategori Sakti Utama Dewi Nigipang																					
Dinas Kesehatan																					

[illegible]

Pudharasa Caturbas	Pengujian dan penanganan peti-peti ikan menular dan tidak menular	Program Pengujian dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terlaksananya pengelompokan karantina baru		450	450 orang	100%			
			Terlaksananya penanganan karantina susu		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi					80%		
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi							
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi							
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi							
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi							
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi							
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi							
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi							
Pudharasa Caturbas	Pengujian dan penanganan peti-peti ikan menular dan tidak menular	Program Pengujian dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
Pudharasa Caturbas	Pengujian dan penanganan peti-peti ikan menular dan tidak menular	Program Pengujian dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			
			Pengelompokan peti-peti ikan yang terinfeksi dan tidak terinfeksi		1	1 desk	100%			

[illegible]

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zukhrina Ningsih	Pengembangan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dan tidak menular	Program Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Program	Terlaksananya kegiatan PKM	1	1	1	1	1	1	1	1
Purwati Ningsih	Pengembangan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dan tidak menular	Program Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Program	Terlaksananya kegiatan PKM	1	1	1	1	1	1	1	1
Purwati Ningsih	Pengembangan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dan tidak menular	Program Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Program	Terlaksananya kegiatan PKM	1	1	1	1	1	1	1	1
Purwati Ningsih	Pengembangan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dan tidak menular	Program Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Program	Terlaksananya kegiatan PKM	1	1	1	1	1	1	1	1

